

**KONDISI KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF  
PERUBAHAN DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI  
DI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT**

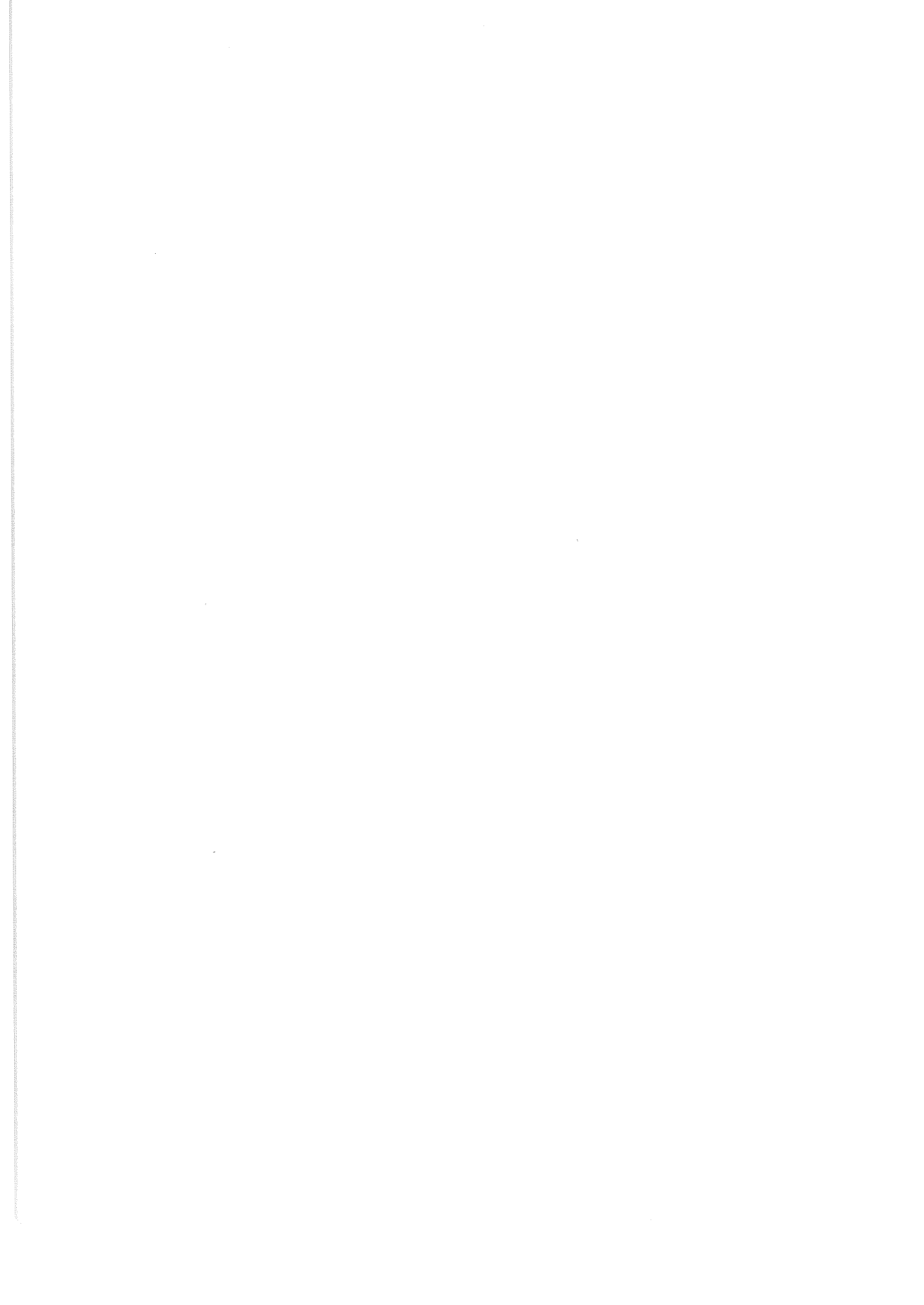


**Oleh:**

**Devi Asiati  
Daliyo  
Eniarti Djohan  
Tri Handayani**



**PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
(PPK-LIPI)  
2006**



## ABSTRAK

Perkembangan jumlah penduduk, sebagai akibat adanya perubahan tingkat kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk mempengaruhi struktur penduduk dari usia muda ke usia produktif. Hal ini berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, yaitu peningkatan usia kerja dan angkatan kerja. Sebagai konsekuensinya pembangunan perekonomian harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi pertambahan angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan, yang dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja dan pengangguran sangat berkaitan dengan keadaan demografi dan sosial ekonomi karena jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial berpengaruh terhadap perubahan kondisi ketenagakerjaan. Penelitian ini yang difokuskan pada pemetaan kondisi makro ketenagakerjaan berkaitan dengan perubahan demografi dan sosial ekonomi perlu dilakukan sebagai langkah awal dari penelitian berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari empat tahun penelitian yang dananya berasal dari DIPA Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Hasil analisis terhadap data kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Solok yang ditandai dengan peningkatan jumlah angkatan kerja sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Solok belum mampu menyediakan kesempatan kerja bagi tambahan angkatan kerja dari tahun ke tahun sehingga tingkat pengangguran mengalami peningkatan. Sektor pertanian yang menjadi andalan di Kabupaten Solok cenderung mengalami penurunan baik dalam hal kontribusi terhadap PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Sementara sektor industri pengolahan belum berkembang karena minimnya investasi swasta yang masuk. Kondisi ketenagakerjaan di kabupaten Solok juga dipengaruhi oleh mobilitas keluar penduduk usia muda dan berpendidikan tinggi yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Selain faktor budaya masyarakat untuk pergi merantau, mobilitas keluar juga disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja disektor formal. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan aspirasi pada sektor formal yang masih tinggi menyebabkan tingginya tingkat pengangguran berpendidikan tinggi terutama dikalangan perempuan.

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan tersebut maka kebijakan perluasan kesempatan kerja perlu dilakukan dengan meningkatkan pembangunan di bidang perkonomian yang didasarkan pada potensi sumber daya alam. Dalam hal ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dilakukan melalui usaha keterkaitan antara sektor pertanian dan industri (agroindustri). Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan membuka peluang bagi investor untuk melakukan pengolahan hasil pertanian.

## KATA PENGANTAR

Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan nasional ke depan terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Tantangan ini semakin berat karena Indonesia belum berhasil sepenuhnya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Dampak krisis ini memperburuk kondisi daya saing SDM Indonesia yang diindikasikan kualitasnya semakin menurun akibat meningkatnya jumlah penduduk yang relatif miskin dan tidak produktif (penganggur). Apabila keadaan ini terus berlanjut, dikuatirkan *demografic dividend*, yaitu keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya rasio ketergantungan akibat penurunan fertilitas dalam jangka panjang sulit diraih, bahkan sebaliknya akan semakin menjadi beban pembangunan.

Laporan mengenai 'Kondisi Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perubahan Demografi dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat' merupakan salah satu hasil kegiatan penelitian yang ditujukan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini merupakan tahap awal dari serangkaian penelitian yang berkelanjutan selama empat tahun (2006-2009). Sebagai suatu rangkaian penelitian, pada tahap pertama ini penelitian lebih menekankan kepada pemetaan tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Solok.

Kegiatan penelitian ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan instansi terkait di lokasi penelitian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kami sampaikan kepada Dr. Omas Bulan Rajagukguk yang telah memberi masukan dan saran dalam penulisan laporan ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada anggota peneliti yang melakukan penelitian ini. Meskipun tim penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam batasan kemampuan yang dimiliki, namun kekurangan dan kekeliruan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk lebih sempurnanya buku ini.

Jakarta, Desember 2006  
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI

Dr. Ir. Aswatini, APU



# DAFTAR ISI



	Halaman	
ABSTRAK	iii	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TABEL	ix	
DAFTAR GAMBAR	Xi	
DAFTAR LAMPIRAN	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Perumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	5
	1.4 Ruang Lingkup	6
	1.5 Kerangka Pemikiran	8
	1.6 Metodologi Penelitian	11
BAB II	DINAMIKA PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN	15
	2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk	16
	2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia: Pendidikan dan Kesehatan	21
	2.1.2 Merantau: Mobilitas Tenaga Kerja Masyarakat Minangkabau	27
	2.2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	30
BAB III	PERKEMBANGAN EKONOMI	37
	3.1 Pertumbuhan Ekonomi	37
	3.2 Struktur Perekonomian	40
	3.3 Investasi	43
BAB IV	KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN TENAGA KERJA	47
	4.1 Penyerapan Tenaga Kerja	47
	4.2 Pengangguran	53
	4.2.1 Pengangguran Terbuka	53
	4.2.2 Setengah Pengangguran	61
		vii

BAB V	PENUTUP	63
	5.1 Kesimpulan	63
	5.2 Rekomendasi	65
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Solok	16
Tabel 2.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kelompok Umum di Kabupaten Solok Tahun 1990, 2000 dan 2004.	19
Tabel 2.3	Perubahan Sarana/Prasarana Pendidikan Negeri Menurut Tahun dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Tahun 1990, 2000 dan 2004)	22
Tabel 2.4	Sekolah dan Jurusan Pada Sekolah Menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Solok.	24
Tabel 2.5	Perubahan Sarana/Prasarana Kesehatan Menurut Tahun dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Tahun 1990, 2000 dan 2004)	26
Tabel 2.6	Kegiatan Ekonomi Penduduk Usia Kerja 10 tahun Keatas di Kabupaten Solok Tahun 1999 - 2004	33
Tabel 3.1	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Solok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	41
Tabel 4.1	Lapangan Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Solok, Tahun 1999 – 2004 (Persen)	48
Tabel 4.2	Status Pekerjaan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, 1999 – 2004 (Persen)	51
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja di Kabupaten Solok, 1999 – 2004 (Persen)	53
Tabel 4.4	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Solok Tahun 1990, 2000 dan 2004.	54
Tabel 4.5	Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 1990, 2000 dan 2004	57

Tabel 4.6	Proporsi Penganggur/Pencari Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Solok, 1990, 2000 dan 2004 (Persen)	58
Tabel 4.7	Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin, 2003 (Persen)	59
Tabel 4.8	Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Lapangan Kerja Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat 1990 – 2004 (Persen)	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proporsi Penduduk Kabupaten Solok Menurut Kelompok Umur, Tahun 1990, 2000 dan 2004	18
Gambar 2.2	Proporsi Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	32
Gambar 2.3	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin.	34
Gambar 2.4	Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	36
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok 1996-2003	38
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Solok 1996-2003	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	73
Lampiran 2	Proporsi Penduduk Kabupaten Solok	74
Lampiran 3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2004.	74
Lampiran 4	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja di Sumatera Barat	75
Lampiran 5	Jumlah dan Pertumbuhan Angkatan Kerja di Sumatera Barat	75
Lampiran 6	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Solok.	76
Lampiran 7	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Solok	77
Lampiran 8	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Solok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	78
Lampiran 9	Jumlah Lulusan Pelatihan Ketrampilan Yang Bekerja Dirinci Menurut Kejuruan, Sampai Dengan Triwulan IV 2004.	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi tingkat kelahiran penduduk pada tiga dekade terakhir telah berdampak terhadap perubahan struktur penduduk Indonesia (*demographic transition*). Indikasi perubahan dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia yang sebelumnya (1970-an sampai 1980-an) didominasi oleh penduduk usia muda, sejak pertengahan tahun 1990-an cenderung mengarah pada meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk tua. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran komposisi penduduk Indonesia dilihat dari segi umur penduduk. Di Indonesia telah terjadi tiga kali perubahan demografi (Ananta, 1997). Pertama, pada tahun 1950-an dimana terjadi penurunan mortalitas secara cepat menyebabkan terjadi perubahan yang cepat dilihat dari jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Pada waktu itu jumlah penduduk meningkat dengan pesat karena fertilitas tidak segera mengikuti penurunan mortalitas. Kedua, pada akhir tahun 1970-an ditandai dengan adanya penurunan fertilitas yang relatif cepat di Indonesia. Transisi demografi kedua ini masih berlangsung sampai sekarang yang dampaknya dapat dilihat dari penurunan angka pertumbuhan penduduk periode 1980-1990-an. Komposisi penduduk berubah dan pada tahun 2020 sehingga diduga angka ketergantungan mencapai angka terendah, yaitu sekitar 44 per 100 (Adioetomo, 2005). Ketiga, dimulai pada tahun 1990-an yang mengubah komposisi regional penduduk di Indonesia. Melalui revolusi mobilitas, perubahan demografi yang terjadi di suatu wilayah akan memperlihatkan dampaknya pada kondisi demografi wilayah lain.

Dalam jangka panjang, transisi demografi ini akan berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi yang di antaranya adalah pada peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, akumulasi kekayaan lebih besar dan tersedianya modal manusia yang makin besar. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga berarti rasio beban tanggungan keluarga akan semakin berkurang, sehingga memberi peluang untuk mendapatkan bonus demografi, yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Bonus demografi ini memberi peluang terbukanya *window opportunity* pada tahun 2020-2030, dimana rasio ketergantungan mencapai titik terendah (Moertiningsih, 2005). Namun demikian, kondisi tersebut juga membawa konsekuensi dan akan menjadi masalah besar jika

lapangan kerja dan penguasaan terhadap asset produktif, terutama untuk dapat bekerja, tidak cukup memadai di tingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut akan tercapai apabila terdapat kondisi yang mendukung, yaitu: pertama tersedia kesempatan kerja yang produktif sehingga mampu meningkatkan *total output* dari tenaga kerja; kedua, terdapat tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif; ketiga, terdapat kebijakan investasi yang khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Transisi lain yang berkaitan dengan pengembangan SDM adalah perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada makin berkembangnya sektor industri pengolahan dan jasa, sejalan dengan semakin berkurangnya peran sektor primer (pertanian) dalam kegiatan ekonomi. Secara teoritis kecenderungan ini mengindikasikan adanya kemajuan kegiatan ekonomi suatu negara (Mirdal, 1986). Namun sekaligus juga membawa konsekuensi persaingan yang semakin ketat dan penyesuaian penyediaan kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Perkembangan sektor industri dan jasa dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan pertumbuhan sektor industri negatif, banyak industri yang tidak berproduksi dan mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sejumlah tenaga kerja.

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat umumnya. Penempatan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan suatu wilayah memerlukan strategi pembangunan yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan hasilnya. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kesenjangan sosial ekonomi yang banyak terjadi di negara berkembang, sebagai dampak dari pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan SDM. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembangunan adalah terciptanya kesempatan kerja, baik dilihat dari peningkatan jumlah maupun kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Bertambahnya angkatan kerja tentu saja berpengaruh terhadap jumlah pencari kerja yang harus disertakan dalam kegiatan ekonomi (bekerja). Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi dalam percepatan pembangunan suatu wilayah. Namun di sisi lain, jumlah yang besar juga berpotensi menimbulkan masalah atau beban pembangunan apabila kualitasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pertumbuhannya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.



Memasuki Abad ke-21, kondisi ketenagakerjaan Indonesia dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, terutama berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas SDM merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan bersaing di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia dihadapkan pada masalah jumlah angkatan kerja yang melimpah. Pada tahun 2002, jumlah angkatan kerja mencapai 100,8 juta orang atau 67,8 persen dari total penduduk Indonesia. Setiap tahunnya sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru memasuki pasar kerja (Bappenas, 2002). Berdasarkan proyeksi data SUPAS 1995 diperkirakan jumlah angkatan kerja masih akan bertambah dari 106,8 juta pada tahun 2005 menjadi 148,5 juta pada tahun 2025 (Moertiningsih, 2005).

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, Indonesia termasuk negara dengan surplus tenaga kerja. Hal ini berarti terdapat ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan ketersediaan kesempatan kerja. Dampak dari ketimpangan ini adalah timbulnya masalah pengangguran yang serius, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia termasuk penganggur atau setengah penganggur, sehingga menjadi salah satu isu pokok dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan berbagai data Sakernas dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan diperkirakan mencapai sekitar 10 persen pada tahun 2004 (Widianto, 2005). Tingkat pengangguran lebih mencolok di kalangan penduduk usia muda, relatif berpendidikan, perempuan dan tinggal di daerah perkotaan. Selain permasalahan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan ketenagakerjaan lainnya yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan masih didominasi informal sektor, masalah keselamatan kerja, diskriminasi tempat kerja, dan masalah kecukupan upah/penghasilan. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di berbagai daerah, terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1997 pengangguran terbuka tercatat sekitar 4,7 persen, kemudian meningkat menjadi 6,9 persen (tahun 1999), 8,1 persen (tahun 2001), 9,1 persen (tahun 2002). Hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah meningkatnya pengangguran pada kelompok usia muda (15-24) dan relatif berpendidikan (SLTA ke atas). Terbatasnya kesempatan kerja bagi kelompok tersebut sangat potensial menimbulkan kerawanan sosial politik yang dapat berdampak pada kestabilan pembangunan umumnya.

Isu ketenagakerjaan lainnya adalah rendahnya kualitas tenaga kerja dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penguasaan keterampilan masih mendominasi ketenagakerjaan pada umumnya, terutama di tingkat pedesaan. Diperkirakan lebih dari separuh angkatan kerja (sekitar 55 persen) berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau kurang, dan hanya sekitar 3 persen lulusan Perguruan Tinggi. Jika indeks mutu kehidupan penduduk diukur dari wajib menempuh pendidikan dasar (wajib) 9 tahun, maka dapat dipastikan bahwa separuh dari penduduk Indonesia berpendidikan rendah (Pranadji, 2004). Berdasarkan laporan tahunan tentang *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilakukan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)*, menempatkan SDM Indonesia pada posisi rendah dibandingkan negara-negara lain termasuk ASEAN. Pada tahun 1997 IPM Indonesia berada pada peringkat 99 dari 175 negara di dunia, dan menurun pada peringkat 112 pada tahun 2003. Posisi Indonesia hanya berada di atas negara-negara seperti Myanmar (urutan ke 131) dan Kamboja (urutan ke 130) di ASEAN. Pada tahun 2004, IPM Indonesia berada pada peringkat 111 dari 175 negara, satu tingkat di atas Vietnam dan pada tahun 2006, posisinya sedikit meningkat yaitu pada peringkat 108.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, sejak tahun 2003 Indonesia dihadapkan pada era persaingan antar negara yaitu *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* pada tahun 2020. Makin longgarnya batas antar negara sebagai konsekuensi globalisasi, maka perpindahan arus barang dan jasa seperti modal, produk dan tenaga kerja akan semakin bebas di antara negara-negara tersebut. Perkembangan tersebut dapat berdampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Dampak positif akan menjadi peluang bagi Indonesia karena dapat mengaktifkan roda perekonomian nasional, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja baru. Namun dari sisi negatif, apabila tenaga kerja Indonesia tidak mampu mengisi lapangan kerja sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang justru akan memberi peluang masuknya tenaga kerja asing yang lebih kompetitif. Di sisi lain, produk-produk pertanian dan industri yang berkualitas dari negara lain bebas masuk ke Indonesia, sehingga dapat menjadi ancaman bagi produk dalam negeri yang kalah bersaing dalam mutu maupun harga.

Berbagai gambaran tersebut di atas menunjukkan, bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan nasional ke depan terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Tantangan ini semakin berat karena Indonesia belum berhasil sepenuhnya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Dampak krisis ini memperburuk kondisi daya saing SDM Indonesia yang diindikasikan kualitasnya semakin menurun akibat meningkatnya jumlah penduduk yang relatif miskin dan tidak produktif (penganggur). Apabila keadaan ini terus berlanjut, dikuatirkan bonus

demografi sulit diraih, bahkan sebaliknya akan semakin menjadi beban pembangunan. Hal tersebut mendorong Puslit Kependudukan – LIPI melakukan suatu kajian tentang ‘Pengembangan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perubahan Struktur Demografi dan Sosial Ekonomi di Daerah’. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan tahap awal dari serangkaian penelitian yang berkelanjutan selama empat tahun (2006-2009). Sebagai suatu rangkaian penelitian, pada tahap pertama ini penelitian lebih menekankan kepada pemetaan tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Solok.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang permasalahan tersebut di atas, penelitian ini menjawab pertanyaan tentang ‘bagaimana struktur ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perubahan demografi, sosial dan ekonomi’. Beberapa pertanyaan yang mengemuka dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perubahan kondisi ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi di tingkat daerah.
2. Apakah isu ketenagakerjaan yang dihadapi daerah.
3. Apakah kebijakan dan program pemerintah dalam menghadapi permasalahan dan pengembangan ketenagakerjaan.

## **1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

### ***Tujuan***

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan mengkaji pengembangan ketenagakerjaan di daerah (provinsi & kabupaten) berkaitan dengan perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi. Secara khusus tujuan penelitian adalah:

1. Melihat dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perubahan struktur demografi dan sosial ekonomi di daerah (provinsi & kabupaten) selama 15 tahun terakhir.
2. Mengkaji isu dan permasalahan ketenagakerjaan di daerah.
3. Mengkaji kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan ketenagakerjaan di daerah

## ***Sasaran***

1. Memberikan informasi tentang kondisi ketenagakerjaan dan isu pengembangan ketenagakerjaan dalam kaitan dengan perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi di daerah.
2. Memberikan masukan tentang pengembangan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan bagi pengambil keputusan.
3. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama pemerintah daerah terkait.

## **1.4. Ruang Lingkup**

### ***Substansi***

Berdasarkan aspek substansi, penelitian ini difokuskan pada pemetaan kondisi atau struktur ketenagakerjaan di daerah. Struktur ketenagakerjaan, meliputi jumlah dan komposisi angkatan kerja yang bekerja dan mencari kerja. Angkatan kerja yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan dan status pekerjaan akan dilihat menurut komposisi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jam kerja. Sedang angkatan kerja yang mencari kerja dilihat menurut komposisi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, desa-kota. Perubahan struktur demografi (dinamika penduduk) akan dilihat dari jumlah dan komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta persebaran penduduk menurut kabupaten/kota dan desa-kota. Sedangkan perubahan ekonomi meliputi PDRB, pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Di samping itu, dilihat pula sarana-prasarana sosial-ekonomi sebagai pendukung pengembangan ketenagakerjaan di daerah yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi serta aksesibilitasnya.

### ***Pemilihan Daerah Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ditekankan pada daerah yang memiliki IPM relatif rendah. Kabupaten Solok termasuk daerah yang mempunyai IPM kelompok rendah dengan tingkat kemiskinan penduduk cukup tinggi. Dibandingkan dengan daerah Sumatera Barat lainnya, secara statistik tingkat kemiskinan Kabupaten Solok nomor dua setelah Kabupaten Mentawai. Berdasarkan data tahun 2004, persentase penduduk miskin di Kabupaten Solok adalah sebesar 14,4 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkan provinsi sebesar 10,5 persen (Biro Pusat Statistik, 2004). Padahal bila dilihat dari kondisi sumber daya alam, terutama di bidang pertanian, daerah ini berpotensi untuk menyumbang

pendapatan daerah Kabupaten Solok. Apakah rendahnya IPM dan tingginya tingkat kemiskinan daerah tersebut disebabkan adanya beberapa kampung yang sulit dijangkau dan tidak adanya sarana-prasarana sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, atau rendahnya tingkat pendidikan penduduk dan tingginya tingkat mobilitas keluar sehingga yang tinggal kelompok penduduk tidak produktif?

Kondisi tersebut turut mendorong penelitian ini memilih Kabupaten Solok sebagai daerah penelitian agar dapat dipahami permasalahan ketenagakerjaan di daerah yang mempunyai kondisi penduduk IPM rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Apalagi daerah ini baru mengalami pemekaran dan menjadi daerah otonom sehingga dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Solok yang sedang membangun, khususnya untuk pengembangan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Dengan demikian diharapkan akan terwujud peningkatan kesejahteraan bagi penduduk Kabupaten Solok di masa depan.

### ***Profil Daerah Penelitian***

Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Setelah Otonomi Daerah, yaitu pada tahun 2003, Kabupaten Solok mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran wilayah ini menyebabkan luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten ini menjadi berkurang. Begitu juga sumber daya alam yang dijadikan potensi daerah, seperti potensi perkebunan besar masuk ke wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2004 mencapai 341.697 jiwa tersebar di 14 kecamatan dan 74 nagari. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Lembah Gumanti dan terkecil adalah Kecamatan Danau Kembar. Sedang kecamatan yang berjarak terjauh dari pusat kabupaten adalah Kecamatan Tigo Lurah dan yang terdekat adalah Kecamatan Gunung Talang. Letak dan jarak kecamatan terhadap pusat kabupaten merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat karena akses masyarakat terhadap fasilitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan makin berkurang. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Di antara kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang tergolong kecamatan miskin, yaitu Kecamatan Tigo Lurah, Giliran Gumanti, Payung Sekaki, Pantai Cermin, 9 Koto Sungai Lasi, 10 Koto Diatas dan Kecamatan Danau Kembar. Kemiskinan pada kecamatan Tigo Lurah dan Giliran Gumanti disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Kedua kecamatan ini relatif terisolir

dibandingkan kecamatan lain sehingga ada keterbatasan infrastruktur pada kecamatan tersebut.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok tahun 2004 baru mencapai 68. Angka ini lebih rendah dari tingkat provinsi dan nasional. Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk percepatan pemerataan pembangunan daerah tertinggal sangat kuat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) Daerah tahun 2006-2010, pemerataan pembangunan pada daerah tertinggal menjadi program strategis yang akan dilakukan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Struktur atau kondisi ketenagakerjaan yang akan dilihat meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Angkatan kerja adalah segmen penduduk usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang memasuki pasar kerja (bekerja dan mencari kerja). Sebagai bagian dari penduduk, jumlah dan komposisi angkatan kerja dipengaruhi oleh besarnya jumlah dan komposisi penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitu juga dengan besarnya jumlah angkatan kerja pada masing-masing wilayah ditentukan oleh persebaran penduduk secara geografis.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran, bahwa ada keterkaitan antara kondisi ketenagakerjaan sebagai variabel terikat (*dependent variabel*) dengan variabel demografi dan ekonomi sebagai variabel bebas (*independent variabel*). Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan variabel antara yaitu ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana yang dikategorikan sebagai variabel sosial.

Variabel demografi yang diduga berpengaruh pada jumlah angkatan kerja dilihat dari jumlah, komposisi dan persebarannya. Jumlah penduduk suatu daerah ditentukan oleh tingkat fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan mobilitas (perpindahan). Kenaikan dan penurunan tingkat kelahiran berdampak pada kenaikan dan penurunan jumlah penduduk. Kenaikan dan penurunan tingkat mortalitas berpengaruh pada pengurangan dan peningkatan jumlah penduduk. Sementara perpindahan penduduk berpengaruh pada komposisi penduduk dan tenaga kerja. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dapat diketahui struktur penduduk dan angkatan kerja. Keadaan sosial ekonomi penduduk dapat mempengaruhi perilaku fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk dan akhirnya menyebabkan perubahan pada jumlah dan komposisi penduduk. Begitu juga

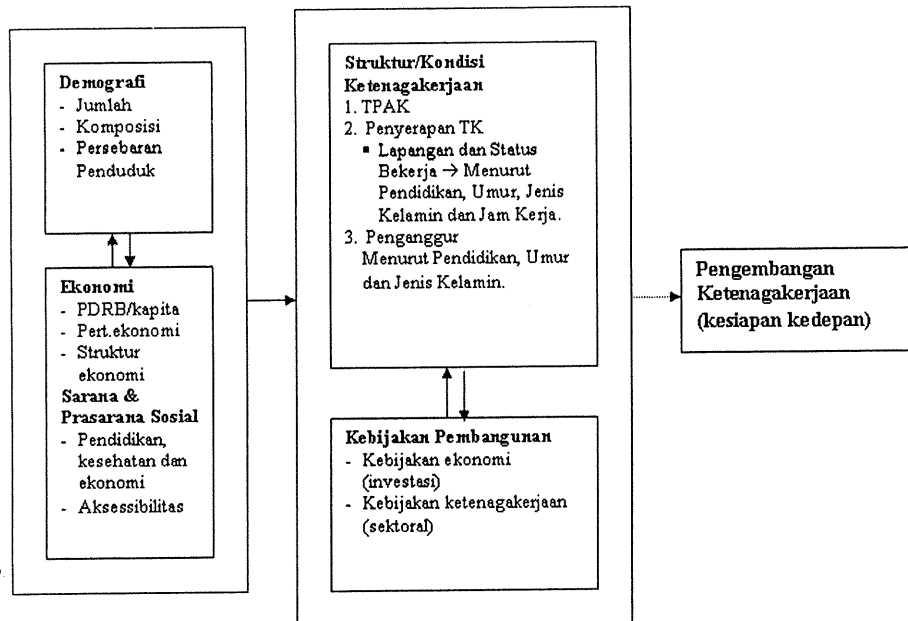
akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas penduduk dan akses terhadap sarana ekonomi mempengaruhi keadaan perekonomian.

Perkembangan ekonomi secara makro, meliputi PDRB, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja bagi tambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Pada akhirnya perkembangan perekonomian berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan, khususnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran.

Penelitian ini juga melihat kebijakan pembangunan, terutama kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai faktor eksternal yang berpengaruh pada kondisi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja. Kegiatan pembangunan harus dapat menyerap pencari kerja (penganggur) dan tambahan angkatan kerja baru. Keadaan ini dapat terjadi jika pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja sejalan dengan pertumbuhan kesempatan kerja, yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perekonomian suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai akibat situasi perekonomian secara makro mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan. Semakin meningkat kegiatan ekonomi, maka permintaan tenaga kerja juga semakin meningkat.

Otonomi Daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 memberi kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk menentukan pembangunan di daerah termasuk pengembangan SDM. Di satu sisi kewenangan yang lebih besar memberi keleluasaan bagi daerah dalam mengembangkan ketenagakerjaannya, di sisi lain pemerintah daerah perlu kesiapan dalam mengelola sumberdaya di daerahnya. Lihat skema kerangka berpikir di bawah ini.

## Skema Kerangka Pemikiran



## Konsep Definisi

Secara operasional ada beberapa konsep definisi yang dipakai pada penelitian ini, yaitu:

- *Kondisi ketenagakerjaan* dilihat dari tiga aspek yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jumlah dan komposisi angkatan kerja yang bekerja dan jumlah dan komposisi pencari kerja (pengangguran). Komposisi angkatan kerja yang bekerja dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan dan status pekerjaan meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, desa kota, jam kerja. Sedangkan pencari kerja dilihat menurut komposisi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan.
- *Perubahan struktur demografi* dilihat dari perubahan jumlah penduduk dan penduduk dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.



- *Perubahan ekonomi* dilihat dari perubahan keadaan perekonomian penduduk secara makro yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi, struktur PDRB dan perubahan struktur ekonomi.
- *Perkembangan Sarana dan Prasarana Sosial* adalah meningkat/menurunnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta bagaimana akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana tersebut.
- *Angkatan Kerja* adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan dilakukan bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Batasan umur dalam pengelompokan angkatan kerja yang digunakan adalah menurut definisi BPS sesuai dengan data yang digunakan, yaitu Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004.
- *Bekerja* adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh pendapatan paling sedikit 1 jam selama seminggu (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. *Mencari kerja* adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey dilakukan orang tersebut sedang mencari pekerjaan. Konsep bekerja dan mencari kerja menggunakan definisi BPS sesuai dengan data yang digunakan

## 1.6. Metodologi Penelitian

### *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif. Pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Tenaga Kerja (pusat dan daerah) maupun instansi terkait di daerah penelitian. Data kuantitatif digunakan untuk memetakan dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan, perubahan struktur demografi dan perubahan sosial ekonomi. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami lebih mendalam tentang isu dan permasalahan ketenagakerjaan dalam konteks perubahan demografis, sosial dan ekonomi yang diperoleh berdasarkan analisis data sekunder, serta isu-isu terkait dengan pengembangan ketenagakerjaan di daerah.

## ***Sumber Data***

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari BPS yaitu data Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004. Data tersebut digunakan untuk melihat perubahan struktur demografi dan sosial ekonomi penduduk serta kondisi ketenagakerjaan yang meliputi penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Data lainnya bersumber dari data sekunder yang dikeluarkan oleh dinas dan instansi terkait serta pemerintah daerah Kabupaten Solok, terutama untuk melihat gambaran dan permasalahan daerah secara utuh.

Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan FGD dengan narasumber yang relevan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di antaranya yang berhasil ditemui adalah Bupati Solok, kepala dinas dan staf dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, staf Bappeda, informan kunci serta kelompok masyarakat yang terkait dengan sektor unggulan daerah Kabupaten Solok, (antara lain masyarakat petani, nelayan, perusahaan kecil, sektor informal dan jasa).

## ***Teknik Pengumpulan Data***

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil publikasi/dokumen instansi pemerintahan seperti BPS, Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah, dan institusi terkait. Sementara data primer dikumpulkan melalui serangkaian teknik pengumpulan seperti wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dan studi kepustakaan (*desk review*).

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan dipilih secara purposif. Agar wawancara terfokus pada permasalahan yang dicari, digunakan pedoman wawancara yang mengacu kepada beberapa variabel dari permasalahan penelitian. Berdasarkan pedoman wawancara tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semakin berkembang namun selalu berada dalam koridor variabel yang ada di pedoman wawancara.

Penentuan informan untuk wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan teknik *snow ball*. Pemilihan informan diperoleh melalui informasi dari informan awal ke informan selanjutnya yang mengetahui dan memahami permasalahan. Teknik ini digunakan sebagai *chek and re-chek* agar informasi yang diperoleh lengkap dan utuh sesuai dengan data yang dicari.

*Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk mengklarifikasi dari berbagai isu yang relevan dengan subyek penelitian dan mendapatkan obyektivitas dari suatu permasalahan yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Adapun tema diskusi ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kondisi di lapangan. Sedangkan *desk review* dilakukan melalui pengumpulan berbagai hasil studi/penelitian yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.

### ***Analisis Data***

Dalam penelitian ini, data kuantitatif dan kualitatif dianalisa secara deskriptif analisis. Data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari variable-variabel demografi dan sosial ekonomi yang mempengaruhi struktur ketenagakerjaan. Data kualitatif dianalisis untuk memberi pendalaman isu dan permasalahan ketenagakerjaan berkaitan dengan kecenderungan perubahan struktur demografi, sosial ekonomi dan struktur tenaga kerja. Berdasarkan isu dan permasalahan tersebut maka diperoleh isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ketenagakerjaan.

### ***Pemilihan Informan***

Informan dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang diduga sangat berkompeten dengan permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Solok. Dalam hal ini, ada tiga kelompok besar yang telah berhasil diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pejabat instansi pemerintahan, antara lain dari Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, BKKBN, BKPM, dan instansi terkait lainnya.
2. Kelompok pengusaha.
3. Kelompok masyarakat petani, nelayan, jasa dan sektor informal, akademisi dan lainnya yang terkait dengan subyek penelitian.

### ***Organisasi Penulisan***

Laporan hasil penelitian 'Kondisi Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perubahan Demografi, dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Solok' terdiri dari 6 Bab. Bab I adalah pendahuluan yang memberi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran, dan metodologi penelitian yang digunakan. Bab II menganalisis dinamika penduduk dan ketenagakerjaan meliputi perkembangan jumlah, penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Bab III membahas mengenai perkembangan perekonomian dan kesempatan kerja

di Kabupaten Solok, Bab IV membahas penyerapan tenaga kerja dan pengangguran, serta Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang berisi bahasan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah.

## **BAB II**

# **DINAMIKA PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA**

### **Pengantar**

Perubahan jumlah penduduk tercermin dari perubahan struktur penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua atau sebaliknya. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja dan angkatan kerja masa kini dan akan datang. Sebagai bagian penduduk, jumlah angkatan kerja tergantung pada besarnya jumlah dan komposisi penduduk.

Perubahan penduduk juga dipengaruhi oleh adanya perubahan sosial yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap kelahiran, kematian dan migrasi. Begitu pula dengan perubahan ideologi yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi nilai-nilai mereka dalam pilihan pekerjaan. Perubahan sosial yang merupakan variasi dari cara hidup yang diterima masyarakat umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena adanya perubahan geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi di masyarakat (Yuliati dan Poernomo, 2003:123). Kondisi sosial-budaya, mobilitas penduduk dan kondisi geografis di Kabupaten Solok mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah dan pengembangan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Disamping itu, kondisi SDA dan lingkungan geografis yang bervariasi, yakni daerah pegunungan, perkotaan dan danau yang sangat berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan penduduk di wilayah tersebut. Misalnya penduduk di pegunungan berusaha di bidang pertanian sayur, di perkotaan bidang perdagangan dan wilayah danau bidang perikanan.

Bagian ini akan mendeskripsikan dan mengkaji perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan khususnya angkatan kerja serta faktor-faktor yang berpengaruh. Bagian ini juga melihat kondisi sosial-budaya masyarakat yang berpengaruh pada perubahan jumlah penduduk dan angkatan kerja, seperti budaya merantau dikalangan masyarakat minang. Mobilitas penduduk keluar maupun masuk berpengaruh terhadap perubahan struktur penduduk.

## 2.1. Jumlah dan Struktur Penduduk

Kondisi lingkungan sosial, dinamika penduduk dan budaya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, agama dan tingkat pendidikan yang tumbuh di masyarakat. Bagian ini akan menggambarkan dan mengkaji dinamika penduduk di masyarakat Kabupaten Solok sebelum maupun setelah terjadi pemekaran dan menjadi kabupaten baru. Fokus kajian adalah pada perubahan jumlah penduduk dan struktur penduduk serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan di Kabupaten Solok.

Jumlah penduduk Kabupaten Solok meningkat dari 427.476 jiwa pada tahun 1990 menjadi 440.154 jiwa pada tahun 2000 dan 431.697 jiwa tahun 2004. Pada tahun 2004 terjadi penurunan jumlah penduduk Kabupaten Solok karena adanya pemekaran wilayah menjadi dua kabupaten yaitu, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2003. Meskipun jumlah penduduk di Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan namun peningkatannya semakin mengecil tercermin dari laju pertumbuhan yang semakin kecil (lihat tabel 2.1). Selama periode 1980-1990 pertumbuhan penduduk sebesar 2,10 persen kemudian turun menjadi 0,29 persen pada periode 1990-2000 lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat (0,59). Penurunan tingkat kelahiran diduga sangat berpengaruh pada penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Berdasarkan perkiraan yang ada terdapat kecenderungan penurunan tingkat kelahiran dan jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup oleh penduduk perempuan usia produktif. Jika dilihat pada tingkat provinsi terjadi penurunan tingkat kelahiran (TFR- *Total Fertility Rate*) dari 4,8 (1982) menjadi 3,9 (1987), 3,3 (1992) dan 3,2 (2003). Kondisi tingkat kelahiran untuk tingkat Kabupaten Solok dianggap tidak jauh berbeda dengan tingkat provinsi. Selanjutnya pada periode 2000-2004 terjadi penurunan jumlah penduduk dengan pertumbuhan -6,13 sebagai akibat pemekaran wilayah sehingga jumlah penduduk yang masuk wilayah Kabupaten Solok menjadi berkurang.

Tabel 2.1: Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Solok

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
1971	294.730	-
1980	355.526	2,10
1990	427.476	1,86
2000	440.154	0,29
2004	341.697	-6,13

Sumber: - Kabupaten Solok Dalam Angka, 1990.  
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok dan kecamatan Tahun 2004, BPS

Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Solok meningkat sebesar 1,03 persen dari tahun 2003 yang berjumlah 330.978 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 14 kecamatan (Lampiran 3) dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 2004, Kecamatan Kubung memiliki jumlah penduduk paling banyak, yaitu 15,6 persen dari total penduduk Kabupaten Solok. Payung Sekaki adalah kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya atau yaitu 2,44 persen. Kemudian tingkat kepadatan penduduk juga bervariasi tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Solok adalah sebesar 91 jiwa/km<sup>2</sup>. Ada delapan kecamatan yang penduduknya melebihi kepadatan penduduk kabupaten, yaitu Kecamatan Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Danau Kembar, Gunung Talang, Bukit Sundi, Kubung, X Koto Singkarak dan Junjung Sirih. Besarnya jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah atau kecamatan dipengaruhi kondisi sumber daya alam dan kemajuan kegiatan ekonominya. Kepadatan penduduk tinggi biasanya terdapat pada pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, seperti Kecamatan Kubung yang memiliki kepadatan tertinggi. Sedangkan Kecamatan Tigo Lurah yang terletak agak terisolir dengan luas wilayah paling besar memiliki kepadatan terendah yaitu 14 jiwa/km<sup>2</sup>. Begitu juga dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang minim, seperti Sulit Air di Kecamatan X Koto Diatas, dengan wilayah yang berbukit kurang potensial untuk dijadikan lahan pertanian sehingga banyak penduduknya yang pergi merantau.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh sex ratio sebesar 94,86 persen. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah banyaknya penduduk laki-laki yang pergi merantau. Seperti diketahui bahwa mobilitas keluar lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada perempuan. Banyaknya penduduk perempuan dapat dilihat di desa atau kampung, dimana pada masing-masing rumah lebih banyak ditinggali oleh perempuan karena anak laki-laki pergi merantau, seperti di Nagari Sulit Air. Namun terdapat tiga kecamatan yang memiliki sex ratio lebih dari seratus yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Hiliran Gumanti dan Tigo Lurah. Hiliran Gumanti dan Tigo Lurah termasuk kecamatan miskin dan letaknya agak terisolir sehingga hal ini kemungkinan berpengaruh pada mobilitas tenaga kerja laki-laki untuk keluar.

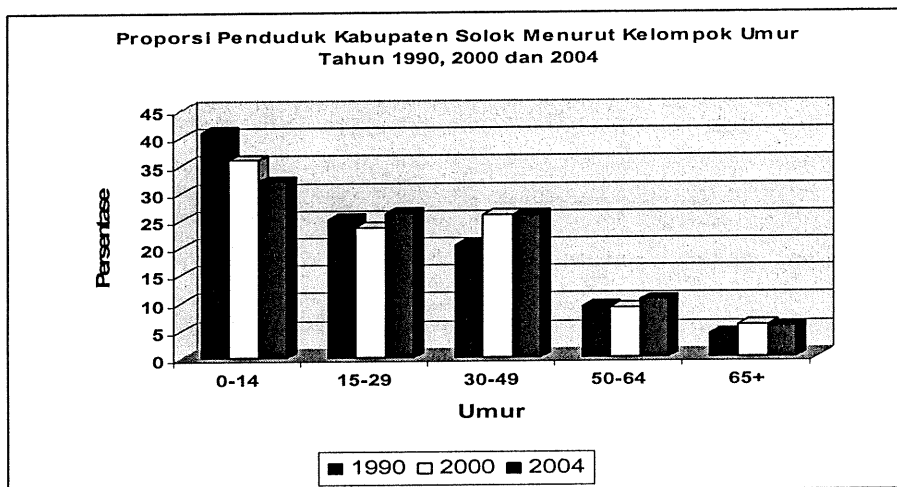
Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur, penduduk Kabupaten Solok tergolong penduduk sedang dengan proporsi penduduk terbesar berada dibawah umur 15 tahun, yaitu antara 30-40 persen<sup>1</sup>. Proporsi penduduk usia

---

<sup>1</sup> Komposisi penduduk tergolong struktur muda (penduduk berusia dibawah 15 tahun proporsinya sebesar 40 persen atau lebih), struktur penduduk tua (proporsi penduduk dibawah

muda (0-14 tahun) adalah sebesar 41 persen (1990), 36 persen (2000) dan 32 persen (2004). Namun selama periode 1990-2004, ada kecenderungan perubahan struktur penduduk, dimana proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) mengalami penurunan (Gambar 2.1). Penurunan proporsi penduduk usia muda juga terlihat jelas dari laju pertumbuhan penduduk umur 0-14 tahun. Selama periode 1990-2000 dan 2000-2004 laju pertumbuhan penduduk usia di bawah 14 tahun adalah negatif, meskipun pada periode 2000-2004 penurunan juga disebabkan adanya pemekaran wilayah yang menyebabkan adanya penurunan jumlah penduduk pada semua kelompok umur. Dalam hal ini, terlihat nyata dampak dari Program Keluarga Berencana yang membatasi jumlah kelahiran, ditunjukkan oleh penurunan tingkat kelahiran sampai tahun 2000.

**Gambar 2.1: Proporsi Penduduk Kabupaten Solok Menurut Kelompok Umur, Tahun 1990, 2000 dan 2004**



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, BPS Kab. Solok.

Perubahan struktur penduduk dari penduduk umur muda ke umur dewasa ditunjukkan dari peningkatan proporsi penduduk umur 15 tahun keatas. Pada gambar dapat dilihat bahwa ada kecenderungan peningkatan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas, terutama untuk kelompok umur 30 tahun ke atas terjadi peningkatan pada periode 1990-2004. Peningkatan struktur ke umur dewasa juga terlihat dari laju pertumbuhan selama periode 1990-2000. Laju pertumbuhan penduduk kelompok umur 15-24 tahun menunjukkan

15 tahun kurang dari 30 persen), struktur penduduk sedang (proporsi penduduk dibawah 15 tahun antara 30-40 persen) dan penduduk berusia 65 tahun keatas proporsinya mencapai 10 persen atau lebih (BPS, 2004).



pertumbuhan yang positif meskipun pertumbuhannya kecil. Kemudian untuk kelompok umur 25-29 tahun terjadi laju pertumbuhan yang negatif. Kemungkinan mereka adalah banyak pergi keluar terutama ke kota-kota besar seperti Jakarta untuk mencari pekerjaan setelah selesai menamatkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Solok, Padang maupun kota lainnya di Sumatera Barat. Biasanya para pemuda yang baru menamatkan pendidikan akan mencari pekerjaan di kota lain, terutama di Jakarta. Selanjutnya jumlah penduduk pada kelompok umur 30 tahun keatas cenderung menunjukkan peningkatan pada periode 1990-2000.

Perubahan struktur umur penduduk dari penduduk muda ke penduduk dewasa atau peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan aset bagi dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Solok. Penduduk produktif tersebut dapat bermanfaat jika kualitasnya memadai, dalam arti tingkat pendidikan dan keterampilan dapat diandalkan dan tidak sakit-sakitan. Dalam hal ini, tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kualitas penduduk suatu daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses masyarakat terhadap sarana prasarana tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

**Tabel 2.2: Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Solok Tahun 1990, 2000 dan 2004**

Kelompok Umur	1990	2000	2004	Laju Pertumbuhan	
				1990-2000	2000-2004
0-4	53.332	49.399	33.565	-0,84	-9,21
5-9	62.796	57.290	36.365	-0,91	-10,74
10-14	58.863	51.340	39.491	-0,01	-6,35
15-19	43.171	43.376	37.423	0,05	-3,62
20-24	31.838	32.092	27.690	0,08	-3,62
25-29	32.689	27.873	24.191	-1,58	-3,48
30-34	28.353	31.750	22.734	1,14	-8,01
35-39	26.803	34.033	22.061	2,42	-10,27
40-44	15.560	27.316	22.710	5,79	-4,51
45-49	16.260	20.545	21.105	2,37	0,67
50-54	15.950	15.884	15.838	-0,04	-0,07
55-59	11.001	11.807	9.277	0,71	-5,85
60-64	12.433	12.110	10.507	-0,26	-3,49
65+	18.414	25.331	18.738	3,24	-7,26
Jumlah	427.463	440.154	341.697	0,29	-6,13

Sumber: Kab Solok Dalam Angka 1990, 2000 dan 2004.

Selain dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, jumlah penduduk Kabupaten Solok juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Mobilitas keluar biasanya dilakukan oleh penduduk usia produktif dengan tujuan untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kecenderungan mobilitas keluar pada penduduk usia produktif dapat dilihat dari perubahan proporsi penduduk dari usia 0-14 tahun ke usia 15-29 tahun pada 14 tahun berikutnya.

Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa mereka yang lahir pada tahun 1990 (berada pada kelompok umur 0-14 tahun) memiliki proporsi terbesar dari penduduk tahun 1990. Jika diasumsikan tingkat kematian rendah, kohor penduduk yang lahir tahun 1990 tersebut akan masuk dalam kelompok umur 15-29 tahun pada tahun 2004 yang menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur tersebut lebih kecil. Selisih atau penurunan proporsi tersebut disebabkan karena mereka pergi merantau keluar atau mobilitas keluar. Mobilitas keluar dilakukan oleh hampir semua daerah di Kabupaten Solok. Pada daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang minim dengan kondisi lahan yang kurang subur atau berbukit-bukit maka masyarakatnya banyak yang pergi merantau, seperti di Nagari Sulit Air. Besarnya jumlah perantau dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk yang merantau dengan penduduk yang tinggal di nagari, yaitu 110.000 jiwa berbanding 70.000 jiwa (Berdasarkan wawancara di Bappeda).

### ***Angka Ketergantungan***

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak aktif untuk setiap 100 penduduk aktif secara ekonomis di polulasi tersebut. Angka Ketergantungan diperoleh dengan membandingkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Perubahan struktur penduduk menurut umur dari struktur penduduk muda ke arah dewasa berpengaruh positif terhadap membaiknya angka beban ketergantungan. Angka Ketergantungan penduduk di Kabupaten Solok menunjukkan penurunan dari 83 pada tahun 1990 menjadi 71 tahun 2000 dan 60 pada tahun 2004. Hal ini berarti jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung penduduk produktif semakin berkurang, karena adanya penurunan jumlah penduduk usia non produktif, terutama penduduk usia 0-14 tahun.

Secara teoritis, penurunan angka beban ketergantungan merupakan indikasi dari membaiknya kondisi ketenagakerjaan karena semakin sedikitnya penduduk usia non produktif yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif. Namun dalam hal ini, tidak semua penduduk usia produktif mampu menanggung sejumlah penduduk usia non produktif karena sebagian penduduk usia produktif adalah penganggur yang tidak memiliki pendapatan baik untuk menopang hidupnya maupun penduduk nonproduktif. Untuk melihat kondisi riil beban ketergantungan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan penduduk produktif yang bekerja sebagai pembanding. Berdasarkan penghitungan yang menggunakan penduduk bekerja sebagai pembanding maka diperoleh Angka Beban ketergantungan yang semakin besar, yaitu 147 pada tahun 1990, 155 tahun 2000 dan 92 pada tahun 2004.

Selama periode 1990-2004 terjadi penurunan beban ketergantungan penduduk usia produktif. Secara nasional, penurunan ini diperkirakan akan sampai tahun 2030 mencapai 44, yang disebut *the window of opportunity*, setelah itu rasio ketergantungan akan meningkat kembali akibat meningkatnya penduduk usia 65 tahun keatas (Adioetomo, 2005).

### **2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia: Pendidikan dan Kesehatan**

Mengacu kepada tiga pilar pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Solok, yakni pendidikan, kesehatan dan UKM (Usaha Kecil Menengah), tampaknya sektor pendidikan dan kesehatan termasuk dalam fokus utama pembangunan di daerah tersebut. Kedua sektor tersebut merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi bila ingin meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Solok. Permasalahan tersebut di samping adanya kendala sarana-prasarana yang belum mencukupi dan memadai, namun juga pengetahuan masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami arti pentingnya kedua sektor tersebut bagi peningkatan kualitas SDM.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian ini diawali dengan mendeskripsikan perkembangan sarana-prasarana dari kedua sektor tersebut. Dengan melihat kondisi tersebut, diharapkan dapat diketahui permasalahan yang berkaitan dengan kedua sektor tersebut dalam kaitannya untuk peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Solok. SDM yang berkualitas dan SDA yang ada di Kabupaten Solok tentu akan dapat membangun Kabupaten Solok sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

#### ***Sektor Pendidikan***

Diterapkannya otonomi daerah telah mendorong adanya pemekaran wilayah, termasuk di Kabupaten Solok yang dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pembagian wilayah ini juga berdampak terhadap sarana-prasarana pendidikan yang terbagi sesuai dengan wilayah yang termasuk dalam kabupaten tersebut. Namun tampaknya, Kota Solok masih menjadi pusat kegiatan pendidikan karena berbagai tingkat pendidikan lanjut masih terpusat di kota tersebut. Oleh karena itu, Kabupaten Solok sebagai kabupaten baru sedang menata diri termasuk di bidang pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas SDM penduduknya.

Sarana-prasarana pendidikan yang ada di lingkungan Kabupaten Solok tersebar di 14 kecamatan dan dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Sekolah yang dikelola swasta umumnya adalah pendidikan Agama Islam, namun berada di bawah naungan Departemen Agama. Dalam perkembangan

antara tahun 1990 dan tahun 2000 menunjukkan, bahwa sarana sekolah tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan menunjukkan peningkatan. Setelah otonomi daerah, di mana Kabupaten Solok berdiri sendiri jumlah tersebut menurun karena sebagian masuk wilayah kabupaten yang baru. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Solok untuk Tahun 2004, jumlah sekolah setingkat SD ada 331 unit, SLTP 37 unit dan SLTA 19 unit yang tersebar di 14 kecamatan. Dari jumlah tersebut ada 53 sekolah di bawah naungan Departemen Agama, yang umumnya adalah sekolah yang berorientasi Agama Islam.

Dilihat dari tiga tingkat pendidikan (SD, SLTP dan SLTA) menunjukkan, bahwa jumlah sarana-prasarana pendidikan tersebut kurang proporsional karena jumlah SD cukup banyak dibanding dengan jumlah murid. Hal ini terkait dengan menurunnya jumlah penduduk usia SD akibat keberhasilan turunnya angka kelahiran. Dari 331 sekolah SD dan setingkatnya rata-rata setiap SD menampung murid sekitar 147 siswa dan setiap kelas rata-rata hanya diisi 23 siswa. Sedangkan pada tingkat sekolah lanjutan dan setingkatnya rata-rata mempunyai murid di atas 400 siswa, yakni dari 37 SLTP dan 19 SLTA (lihat Tabel 2.3).

**Tabel 2.3 : Perubahan Sarana/Prasarana Pendidikan Negeri Menurut Tahun dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Tahun 1990, 2000 dan 2004)**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	1990	2000	2004	KETERANGAN
1.	<b>SD</b>				
	Jumlah sekolah	459	470	331	• Tahun 2004 ada 8 sekolah dibawah naungan Depag.
	Jumlah guru	3.081	3.002	2.419	
	Jumlah siswa	74.910	72.351	48.766	
	Jumlah kelas	3.063	2.733	2.162	
	Rasio siswa dan kelas	24	26	23	
2.	<b>SLTP</b>				
	Jumlah sekolah	33	45	37	• Tahun 2004 ada 34 sekolah dibawah naungan Depag
	Jumlah guru	911	647	1550	
	Jumlah siswa	10.892	15.308	15.066	
	Jumlah kelas	377	452	510	
	Rasio siswa dan kelas	29	34	30	
3.	<b>SLTA</b>				
	Jumlah sekolah	12	22	19	• Tahun 2004 ada 11 sekolah dibawah naungan Depag
	Jumlah guru	435	647	780	
	Jumlah siswa	5.001	8.630	7.930	
	Jumlah kelas	140	20.6780	267	
	Rasio siswa dan kelas	36	42	30	

Sumber data:

- Data Tahun 1990: Kabupaten Solok Dalam Angka;
- Data Tahun 2000: Statistik Pendidikan , Data Pokok dan Indikator Pendidikan Kabupaten. [Http://Depdiknas.go.id](http://Depdiknas.go.id)
- Data Tahun 2004: Kabupaten Solok Dalam Angka

Dari sisi akses, sarana-prasarana pendidikan tersebut umumnya mudah dijangkau karena tersebar di hampir semua kecamatan. Kendatipun untuk tingkat SLTP terdapat kecamatan yang tidak terdapat satu sekolahpun, yaitu Kecamatan Payung Sekaki sehingga sedang dibuat SMP satu atap. Namun untuk tingkat SLTA kejuruan belum merata, sehingga mendorong siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan kejuruan akan sekolah di luar Kabupaten Solok seperti Kota Padang dan Kota Solok. Bahkan ada kecenderungan untuk memilih sekolah di Kota Padang yang dianggap lebih tinggi untuk memperoleh peluang kerja setelah tamat dari sekolah tersebut. Memang dana yang dibutuhkan lebih tinggi untuk kost dan biaya hidup, namun karena adanya hubungan sekolah dengan industri terkait yang memungkinkan siswa dapat berlatih sangat menarik siswa. Apabila ada keberuntungan, setelah tamat pintu untuk memasuki lapangan kerja di tempat mereka pernah PKL pun terbuka. Kendala untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan keinginan para pemuda ini adalah dana yang sangat tinggi bila harus sekolah di Kota Padang atau tempat lain di mana sekolah tersebut berada. Keluarga harus menyiapkan dana tidak hanya untuk pendidikan, namun juga akomodasi dan biaya hidup selama di rantau.

Mengacu kepada gambaran sarana dan prasarana pendidikan dan komposisi penduduk menurut usia di Kabupaten Solok, untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan daerah perlu ditata ulang sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kabupaten tersebut. Mengingat ratio siswa per kelas hanya sekitar 20-an maka program regrouping sekolah SD yang sudah ditetapkan menjadi suatu kebijakan pemerintah perlu dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan peluang kerja, sarana pendidikan yang ada sudah mulai diarahkan pada peningkatan SDM yang sesuai dengan potensi SDA Kabupaten Solok dimana peningkatan SDM pada bidang agroindustri untuk pengembangan kantong-kantong daerah pertanian, bidang perikanan untuk pengembangan daerah danau, bidang lahan kering untuk pengembangan daerah-daerah bukit kering, bidang pariwisata untuk pengembangan daerah-daerah wisata, dan bidang mesin/elektronik/computer untuk pengembangan sektor jasa. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, sudah ada 7 unit sekolah SMK, dua diantaranya merupakan SMK Kecil.

**Tabel 2.4. Sekolah dan Jurusan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Solok**

No.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Jurusan
1	SMKN 1 Gunung Talang	Mekanisme Pertanian Budidaya Pertanian Otomotif Multimedia
2	SMK Kecil Lembah Gumanti	Tata Boga Pariwisata
3	SMK Kecil Hiliran Gumanti	Teknik Pengolahan Kayu
4	SMK PKUW Tanjung Alai	Bisnis manajemen
5	SMK ABW Selayo	Otomotif Elektro
6	SMK Budi Mulya	Bisnis Manajemen
7	SMK Pariwisata Lembah Gumanti	Perjalanan Wisata

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok

Berdasarkan jurusan yang ada pada SMK menunjukkan bahwa jurusan yang ada sudah disesuaikan dengan potensi SDA (lihat tabel 2.4). Kecamatan Lembah Gumanti yang memiliki potensi untuk pariwisata, seperti Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang maka jurusan pada SMK L. Gumanti dan SMK Pariwisata L. Gumanti diarahkan pada peningkatan pariwisata. Begitu juga Hiliran Gumanti yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas maka keberadaan SMK dengan jurusannya diharapkan akan melahirkan para tukang kayu yang handal sekaligus untuk mengurangi praktek illegal logging yang menjual kayu gelondongan. Potensi di bidang pertanian diharapkan akan berkembang menjadi pertanian yang lebih modern dengan adanya jurusan mekanisasi dan budidaya pertanian pada SMKN 1 Gunung Talang. Sedang bagi mereka yang berminat pada bidang industri dan jasa dapat meningkatkan kemampuan pada SMK yang memiliki jurusan bisnis manajemen, otomotif atau elektro. Dalam perencanaan pengembangan sarana-prasarana pendidikan ini penambahan jurusan yang berbasis SDA perlu diperbanyak dan yang sangat penting adalah peningkatan mutu, baik kurikulum maupun tenaga pengajar. Dalam aspek ketenagakerjaan hal ini penting karena lulusan SMK yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang memanfaatkan potensi SDA yang ada. Sementara bagi lulusan SMK yang berminat untuk bekerja pada suatu industri maka diharapkan mereka dapat terserap dengan kualitas yang dimiliki.

## *Sektor Kesehatan*

Manusia yang sehat akan mendukung pembangunan yang direncanakan oleh suatu daerah. Karena itu, pengembangan sektor kesehatan perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Solok bila ingin meningkatkan kualitas SDM penduduk daerahnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Solok telah mencanangkan sektor kesehatan sebagai salah satu pilar pembangunan di era otonomi ini. Ada tiga hal yang perlu dalam mengkaji sektor kesehatan, yakni fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan derajat kesehatan.

Tingkat kematian kelahiran anak dan ibu yang melahirkan merupakan salah satu indikator derajat kesehatan penduduk. Kabupaten Solok yang mempunyai IPM nomor dua terendah se Sumatra Barat, apabila dilihat dari sebelum otonomi (tahun 1990) hingga menjadi kabupaten sendiri kedua indikator tersebut menunjukkan perubahan. Tingkat kematian bayi pada tahun 1900 adalah 264 jiwa dan tahun 2000 menurun menjadi 100 jiwa, yang akhirnya setelah otonomi (tahun 2004) menjadi 82 jiwa. Hal ini berarti, bahwa angka kematian anak lahir hidup di wilayah Kabupaten Solok masih tinggi karena perbedaannya hanya 18 jiwa setelah daerah tersebut terbagi tiga daerah. Tiga besar wilayah Puskesmas yang terdapat angka kematian bayi tertinggi adalah di wilayah Puskesmas Bukit Sileh (12 jiwa), Batu Bajaranjang (11 jiwa) dan Talang Babungo (10 jiwa). Begitupula dengan angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi dibandingkan dengan dua daerah lain setelah otonomi berlangsung, karena pada tahun 2000 (sebelum otonomi) ada 19 jiwa dan setelah terpecah khusus Kabupaten Solok ada 11 jiwa. Kemungkinan pengurangan yang 8 jiwa terbagi antara Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok (lihat tabel 1.2.1).

Apabila dilihat dari fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Solok termasuk lengkap, terutama fasilitas yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan. Puskesmas ada di setiap kecamatan yang didirikan berdasarkan Inpres maupun non Inpres; bahkan Kecamatan Gunung Talang dan Kecamatan Kubung memiliki lebih dari satu Puskesmas. Dari 18 Puskesmas yang ada di lingkungan Kabupaten Solok hanya enam Puskesmas yang menerima rawat inap yaitu di Kecamatan Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Payung Sekaki, Gunung Talang, Bukit Sundi, X Koto Singkarak dan X Koto Diateh. Secara geografis daerah-daerah tersebut terletak jauh dari Kota Solok, sehingga akses untuk penduduk yang sakit mendadak dan membutuhkan rawat inap akan sulit bila harus ke Kota Solok. Apalagi sejak otonomi Kabupaten Solok belum memiliki rumah sakit umum dan penduduk harus ke Kota Solok atau Kota Padang (lihat tabel 2.5).

Setelah otonomi (tahun 2004), tenaga kesehatan yang tersedia menunjukkan ada yang meningkat dan ada yang berkurang. Hampir di semua kecamatan terdapat tenaga kesehatan dari berbagai bidang pekerjaan; kecuali dokter gigi. Puskesmas yang menyediakan tenaga dokter gigi adalah Puskesmas Alahan Panjang, Bukit Sileh, Simpang Tj, Nan IV, Kayu Jao, Talang, Selayo, Jua Gaek, Singkarak dan Paninggahan. Sedangkan Puskesmas Gudang Farmasi dapat dikatakan tidak mempunyai tenaga kesehatan yang potensial dan dapat cepat membantu orang sakit, karena yang tersedia hanya tenaga para medis non perawat dua orang (lihat tabel 2.5).

**Tabel 2.5. : Perubahan Sarana/Prasarana Kesehatan Menurut Tahun dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Tahun 1990, 2000 dan 2004)**

NO.	SARANA/ PRASARANA	1990	2000	2004	KETERANGAN
1.	<b>Fasilitas Kesehatan</b>				
	RS Umum	1	1	-	• Ada di Kota Solok
	Tempat tidur RSU	40	50	70	• 6 puskesmas rawat inap
	Toko obat	9	17	15	
	Gudang farmasi	1	1	1	
	Klinik KB	18	-	22	
	Balai Pengobatan	68	1	2	
	Tukang gigi	2	-	-	
	Puskesmas Keliling	12	23	19	
	Puskesmas	21	22	18	
	Pustu	77	106	80	
	Posyandu	863	800	581	
Optikal	-	2	2		
2.	<b>Tenaga Kesehatan</b>				
	Dokter umum	21	24	26	
	Dokter gigi	6	7	9	
	Perawat	219	122	159	
	Non perawat	90	55	46	
	Pembantu perawat	39	10	32	
	Non para medis	33	123	13	
Bidan	-	257	198		
3.	<b>Derajat Kesehatan</b>				
	Lahir hidup	7.983	9.097	6.678	•
	Lahir mati	264	100	82	
	Kematian ibu	32	19	11	
	Angka harapan hidup			64,3	• tahun 2006 meningkat 65,2

Sumber data:

- Data Tahun 1990: Kabupaten Solok Dalam Angka;
- Data Tahun 2000: Statistik Pendidikan , Data Pokok dan Indikator Pendidikan Kabupaten. [Http://Depdiknas.go.id](http://Depdiknas.go.id)
- Data Tahun 2004: Kabupaten Solok Dalam Angka



Gambaran sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Solok menunjukkan, bahwa pemerintah daerah telah menyelenggarakan sarana-prasarana kesehatan untuk pelayanan dasar di wilayahnya. Kendala yang ada terletak dari sarana dan prasarana transportasi sebagai akses penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk di wilayah-wilayah sulit dijangkau seperti di wilayah pegunungan. Misalnya untuk mencapai wilayah Payung Sekaki dan Tigo Lurah dibutuhkan kendaraan yang menggunakan ban radial, sehingga dibutuhkan dana cukup besar bila hendak masuk maupun keluar daerah tersebut. Kondisi kesehatan penduduk dalam kaitannya dengan kualitas tenaga kerja, menurut salah seorang informan, penyakit paru-paru dan malaria masih terbilang tinggi di Kabupaten Solok. Kondisi ini tentu dapat menghalangi jam kerja masyarakat yang umumnya adalah petani dan nelayan danau.

### **2.1.2. Marantau: mobilitas tenaga kerja masyarakat Minangkabau**

Pada dasarnya kegiatan merantau telah dilakukan masyarakat Minangkabau sejak lama, yang dapat dipahami dalam dua pengertian yakni kegiatan mobilitas dengan meninggalkan kampung untuk berbagai keperluan dan perubahan pemikiran. Dari sisi sejarah kegiatan mobilitas penduduk yang terjadi di masyarakat Minang dapat dilihat dari tiga periode, yaitu: 1) merantau untuk mendirikan nagari baru (periode awal hingga abad ke-19); 2) *Marantau Babelok* (akhir abad ke-19 hingga tahun 1930-an); 3) *Marantau Cino* (sejak tahun 1950-an hingga saat ini. Bentuk kedua dan ketiga mempunyai tujuan yang hampir sama dan perbedaannya hanya terletak dari jarak daerah tujuan.

Sekitar abad ke 19 (Masa Perang Padri) para pemuda melakukan perjalanan ke luar kampung dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang keagamaan dengan mengunjungi mesjid (*surau*) yang ada di Sumatra, khususnya Sumatra Barat<sup>2</sup>. Aktivitas ini terutama terjadi pada akhir abad 19 hingga tahun 30-an yang disebut *Marantau Babelok* dengan tujuan lebih untuk peningkatan pengetahuan/pendidikan dan pengalaman hidup. Mereka yang merantau tidak hanya laki-laki lajang namun juga yang telah menikah dengan alasan adanya faktor penarik di daerah rantau yang diperkirakan dapat memperbaiki kedudukan sosial maupun ekonomi. Pada masa itu kegiatan merantau umumnya hanya di kota-kota dekat kampung, sehingga laki-laki beristeri yang pergi merantau masih dapat mengunjungi

---

<sup>2</sup> Abad 19 di Minangkabau muncul kaum Padri yang bergerak dalam bidang keagamaan Islam (politik religius), dikenal dengan nama 'Gerakan Padri' di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol (Imran, 2002:24-28).

isteri dan anaknya. Kemudian, tahun 50-an hingga saat ini daerah tujuan merantau ke luar wilayah Sumatra Barat yang dikenal dengan *Marantau Cino* (Asnan, 2003:175).

Sejarah merantau tersebut, terutama *marantau babelok* dan *marantau cino*, menunjukkan bahwa umumnya ada dua tujuan utama para pemuda Minang pergi merantau, yakni mencari nafkah dan menuntut ilmu. Aktivitas ini bagaikan himbauan kepada kaum laki-laki muda, terutama mereka yang tidak atau belum mempunyai kegiatan di kampung, seperti terungkap dalam pepatah Minang di bawah ini:

Karakatau matang di hulu	(di hulu ada kayu karakatau)
Babuah babungo balum	( belum berbunga dan berbuah)
Marantau bujang dahulu	( <i>merantau</i> bujang dulu)
Di rumah baguno balum	( di rumah belum berguna)

Ungkapan di atas terutama untuk mendorong para pemuda yang belum menikah dan tidak mempunyai kegiatan di kampung agar mencari pengalaman di luar kampung. Masa *marantau babelok* di mana sarana prasarana transportasi masih kurang, para pemuda akan pergi ke mesjid-mesjid atau pesantren yang ada di wilayah Minangkabau untuk menuntut ilmu. Di samping itu, mereka akan mencoba peruntungan dengan berdagang (*manggaleh*) di pasar-pasar kota yang dikunjungi. Oleh karena itu, biasanya mereka akan mendatangi mesjid atau pesantren seiring dengan adanya hari pasar di lokasi tersebut, sehingga transaksi dagang dapat dilakukan pula.

Kegiatan merantau ini mengalami perubahan, yang tidak hanya pada pendidikan keagamaan dan perdagangan, namun berkembang untuk meningkatkan ke pendidikan umum yang belum ada di Minangkabau saat itu. Begitupula dengan pekerjaan, selain di sektor perdagangan juga sektor lain dan merambah ke luar wilayah Minangkabau seperti ke Jawa. Mereka yang ke luar Minangkabau biasanya setelah mapan akan membawa keluarga bagi yang telah menikah, sehingga jarang yang kembali ke kampung sampai turun-temurun.

Gerakan mobilitas, khususnya dalam usaha untuk mencari pekerjaan, masih berlangsung hingga masa ini. Seiring dengan perkembangan zaman, gerakan ini juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Daerah tujuan mereka tidak hanya dalam wilayah Indonesia, bahkan hingga ke Negara Malaysia. Untuk alasan pendidikan, gerakan ini umumnya lebih terkonsentrasi di Kota Padang yang dianggap telah mempunyai sarana-prasarana pendidikan memadai dan tidak terlalu jauh dari kampung tempat tinggalnya. Tentu hal ini dapat terjadi bila didukung oleh kondisi ekonomi orangtuanya, karena sekolah dan tinggal

di kota besar membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan alasan pekerjaan umumnya pada sektor non-formal seperti di bidang perdagangan makanan, pakaian, industri, sopir taxi dan pembantu rumahtangga. Khusus pembantu rumahtangga cenderung dilakukan oleh perempuan namun karena umumnya orang Minang tidak biasa bekerja sebagai pembantu rumahtangga, maka kegiatan ini lebih banyak dilakukan di luar negeri seperti Negara Malaysia karena merasa tidak akan ada yang melihat apa yang dilakukan.

Budaya merantau ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan Kabupaten Solok, terutama di kampung-kampung yang kering dan sulit untuk melakukan kegiatan pertanian. Misalnya penduduk Nagari/Desa Suliak Air banyak yang merantau ke luar kampung untuk mencari pekerjaan, umumnya di sektor perdagangan. Para perantau dari kampung tersebut membentuk persatuan yang dinamakan Suliak Air Sepakat (SAS). Perkumpulan ini bergerak untuk membangun kampung dan keluarga atau penduduk Suliak Air yang ingin berusaha di rantau. Pembangunan kampung dapat dilihat dari sarana-prasarana dan rumah-rumah penduduk yang cukup berkembang. Kampung yang dulu sangat sulit dicapai karena terletak di bukit dan tidak ada sarana jalan, sekarang telah mudah dengan adanya sarana jalan yang dibangun oleh perantau. Bangunan sekolah makin lengkap, khususnya untuk pendidikan keagamaan sehingga memudahkan anak-anak untuk meningkatkan pendidikannya.

Adanya inisiatif dari perantau yang telah sukses di perantauan untuk membantu penduduk, terutama anak-keluarga, dalam meningkatkan ekonomi mereka merupakan dorongan bagi penduduk untuk berusaha di rantau. Khusus di Nagari Suliak Air, perantau akan memberi modal untuk berusaha apa dan di mana pun. Namun umumnya bergerak di sektor informal bidang perdagangan atau rumah makan di Jakarta. Mereka yang diberi modal dipacu untuk berhasil, karena bila tidak berhasil akan ada sanksi sosial yakni 'malu' untuk pulang dan tidak ada lagi yang akan memberi modal. Sanksi sosial tersebut membuat perantau yang kurang berhasil akan selalu berusaha, paling tidak untuk modal pulang kampung. Dampak dari banyaknya penduduk yang merantau ke kota-kota besar adalah kosongnya kampung (*depopulation*) dan yang tinggal hanya kaum perempuan dan orang-orang tua.

Merantau untuk bekerja agak berbeda dengan anak muda yang telah menempuh pendidikan secara serius. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau bekerja di rantau agar dapat merubah 'nasib'. Apabila bekerja dia mengharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki. Gambaran ini terungkap dari ungkapan seorang pemuda anak petani di salah satu kampung:

“.....*ambo* sedang menunggu panggilan kerja dari pabrik di Malaysia. Dulu waktu sekolah pernah latihan kerja di sana dan dijanjikan untuk bekerja. Sekarang ada teman sekolah yang bekerja di sana. Saya sangat berharap untuk dapat bekerja di sana agar merubah hidup”.

Namun untuk dapat bekerja di Malaysia, keluarga harus menyediakan dana yang tidak sedikit yakni senilai satu (1) ekor kerbau atau sekitar lima juta rupiah. Dana tersebut telah tersedia dalam bentuk seekor kerbau yang sewaktu-waktu dapat dijual. Keluarga tidak merasa rugi karena dalam tempo beberapa bulan akan terganti dari upah yang akan diterima di Malaysia nanti. Misalnya, pada saat mengikuti PKL (Pelatihan Kerja Lapangan) pada salah satu perusahaan di Malaysia mengeluarkan biaya untuk surat-surat 3,5 juta rupiah namun selama PKL menerima upah sekitar 3 juta rupiah. Dia tidak khawatir dengan siapa yang akan mengerjakan lahan pertaniannya karena dengan upah yang akan diterima dapat mengupah buruh tani untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukannya.

Pemikiran perubahan pilihan bidang pekerjaan yang umumnya perdagangan dengan sektor industri elektronik di negara asing atau Kota Batam, tampaknya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta kesempatan yang ada. Keinginan untuk bekerja terangkat karena adanya peluang di luar walaupun harus diikuti dengan kemampuan atau pendidikan yang dimiliki. Kesempatan itu terjadi tentu sangat terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan mempunyai hubungan dengan industri yang membutuhkan tamatan dari sekolah tersebut. Kebetulan pemuda ini tamatan dari sekolah kejuruan di Kota Padang, namun sekarang bagaimana dengan kualitas SDM lainnya di Kabupaten Solok.

## **2.2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja**

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang berusia produktif yang bekerja dan mencari kerja. Sebagai bagian dari jumlah penduduk maka besarnya jumlah angkatan kerja tergantung pada besarnya jumlah penduduk. Dalam hal ini, semakin besar jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga semakin besar. Besarnya jumlah angkatan kerja mencerminkan besarnya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja untuk bekerja maupun mencari kerja, yang ditunjukkan oleh besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

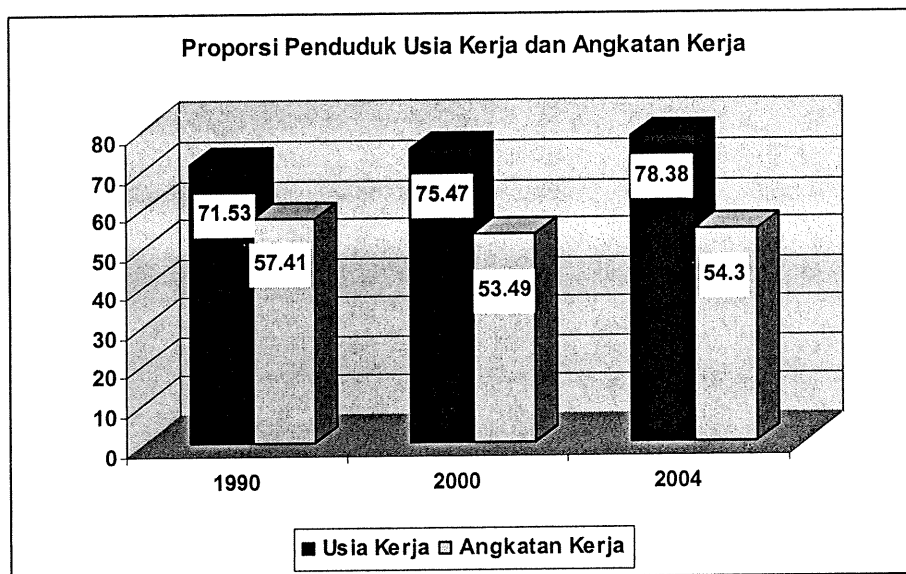
Pembahasan mengenai penduduk usia kerja dan angkatan kerja dalam sub-bab ini menggunakan subset data Sensus Penduduk tahun 1990 dan 2000 serta Susenas 2004 dari BPS. Berdasarkan konsep BPS, ada perbedaan kelompok umur yang didefinisikan sebagai penduduk usia kerja, yaitu pada Sensus Penduduk 1990 menggunakan umur 10 tahun keatas, sedang Sensus 2000 dan Susenas menggunakan kelompok umur 15 tahun keatas. Dalam penelitian ini, kelompok penduduk usia kerja menggunakan data penduduk umur 10 tahun keatas, baik tahun 1990, 2000 dan 2004. Mengingat data yang digunakan adalah subset data dari BPS sehingga dapat dilihat kegiatan seminggu yang lalu penduduk yang berumur 10-14 tahun yang tergolong sebagai penduduk usia muda. Data Susenas 2004 mengambil wilayah Kabupaten Solok sebelum pemekaran sehingga kondisi datanya lebih besar dari kondisi yang ada sekarang setelah pemekaran. Untuk meminimalkan perbedaan data, baik sumber data maupun besarnya maka dalam analisa akan menggunakan data proporsi.

#### *Perubahan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja*

Penduduk usia kerja dibagi dalam dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). Penduduk yang termasuk angkatan kerja dibagi atas mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Sedang penduduk yang tergolong BAK dapat dikelompokkan atas kegiatannya yaitu Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan Lainnya.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan. Proporsi penduduk usia kerja dibandingkan jumlah penduduk meningkat dari 71,53 persen pada tahun 1990 menjadi 75,47 persen tahun 2000 dan 78,38 persen pada tahun 2004 (Gambar 3.2). Sementara laju pertumbuhan Penduduk Usia Kerja meningkat dari 0,8 pada periode 1990-2000 menjadi 1,9 selama periode 2000-2004. Kenaikan proporsi ini juga terlihat dari laju pertumbuhan AK dan BAK. Selama periode 1990-2000 tercatat laju pertumbuhan AK sebesar 0,1 meningkat menjadi 2,3 pada periode 2000-2004 (Tabel 2.6). Pertumbuhan penduduk usia kerja di Kabupaten Solok masih lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 4). Kota Padang, Solok dan Sawahlunto memiliki pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih tinggi dari tingkat provinsi.

**Gambar 2.2: Proporsi Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja**



Sumber: BPS, Data Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004 (Data diolah)

Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang masuk pasar kerja, untuk bekerja maupun mencari kerja. Pada tahun 1990 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Solok sebesar 175.535 orang atau 57,41 persen dari jumlah penduduk usia kerja, kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 177.692 orang atau 53,49 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja ini terus meningkat pada tahun 2004 menjadi 194.676 orang atau 54,3 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Dilihat dari laju pertumbuhannya, rata-rata per tahun mengalami peningkatan yang tajam dalam kurun waktu 1990-2000 dan 2000-2004, yaitu masing-masing 0,1 persen dan 2,3 persen. Namun dibandingkan dengan tingkat provinsi, pertumbuhan angkatan kerja ini masih lebih rendah. Pertumbuhan angkatan kerja tinggi terdapat di kota dibandingkan kabupaten (Lampiran 5). Sebaliknya laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang tergolong bukan angkatan kerja pada periode yang sama cenderung menurun. Dari dua kecenderungan tersebut dapat diperkirakan, bahwa peningkatan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Solok secara relatif terjadi karena adanya penurunan proporsi penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja atau menurunnya mereka yang masih berstatus sekolah dan lainnya. Penurunan proporsi penduduk usia kerja yang berstatus sekolah ini kemungkinan disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang masih berusia sekolah, namun tidak melanjutkan lagi atau mungkin

putus sekolah. Mereka adalah yang tidak melanjutkan ke tingkat SLTA dan perguruan tinggi atau putus sekolah pada tingkat tersebut. Meningkatnya jumlah dan laju angkatan kerja ini dapat diartikan, selama 5 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar kerja yang cukup besar di Kabupaten Solok. Peningkatan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja tersebut apabila tidak diiringi peningkatan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan, yaitu meningkatnya angka pengangguran atau mobilitas angkatan kerja ke luar Kabupaten Solok.

**Tabel 2.6: Kegiatan Ekonomi Penduduk Usia Kerja 10 tahun Ke Atas Di Kabupaten Solok Tahun 1999 – 2004**

No	Jenis Kegiatan Ekonomi	1990	2000	2004
1.	Angkatan Kerja :	175.535	177.692	194.676
	a. Bekerja	98,5	96,8	91,5
	b. Mencari Kerja	1,5	3,2	8,5
	Jumlah	100,0	100,0	100,0
	Tingkat Partisipasi A.K. (TPAK)	57,4	53,5	54,3
2.	Bukan Angkatan Kerja :	130.223	154.487	163.815
	a. Sekolah	47,3	45,4	45,8
	b. Mengurus Rumah Tangga	35,5	34,3	37,7
	c. Lainnya	17,2	20,3	16,5
	Jumlah	100,0	100,0	100,0
3.	Penduduk Usia Kerja (15-64 th) :	305.758	332.179	358.491
4.	Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja Per Tahun (1990-2000 dan 2000 - 2004) :	-	0,1	2,3
5.	Laju Pertumbuhan Bukan Angkatan Kerja Per Tahun (1990- 2000 dan 2000 - 2004):	-	1,7	1,5
6.	Laju Pertumb. Pendd. Usia Kerja Per Tahun (1990-2000 dan 2000 - 2004) :	-	0,8	1,9

Sumber : BPS, Data Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004 (Data diolah)

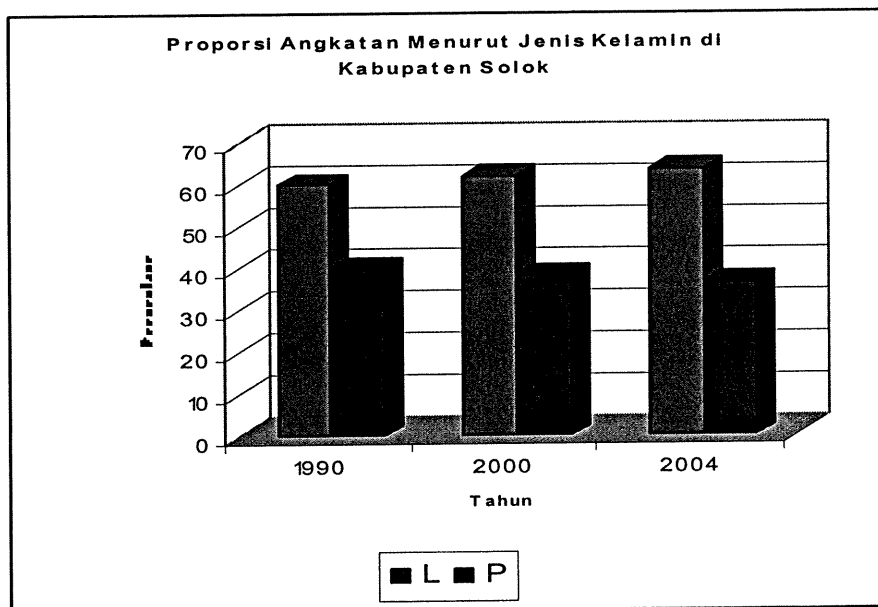
#### *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di Kabupaten Solok selama periode 1990-2004 cenderung mengalami penurunan. TPAK turun dari 57,4 pada tahun 1990 menjadi 53,5 pada tahun 2000. Kemungkinan belum pulihnya perekonomian akibat krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan banyaknya penduduk usia

kerja yang keluar dari pasar kerja yang diindikasikan dari peningkatan penduduk usia kerja yang tergolong Bukan Angkatan Kerja.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja (*employment*) di Kabupaten Solok pada tahun 1990 sebanyak 172.961 orang (*employment rate*-nya 98,5 persen dari jumlah angkatan kerja). Pada 10 tahun (tahun 2000) berikutnya menurun menjadi 172.052 orang (hanya 96,8 persen dari jumlah angkatan kerja). Empat tahun kemudian (tahun 2004) meningkat menjadi 178.140 orang, sedangkan *employment rate* terus menurun menjadi 91,5 persen yang mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka (*unemployment rate*) meningkat tajam selama dua periode tersebut. Dari tingkat pertumbuhan selama 14 tahun rata-rata pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja ternyata hanya sebesar 0,2 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan angkatan kerja (*labour forces*) selama periode tersebut mencapai 0,7 persen (apabila dibedakan dalam periode pada periode 1990-2000 sebesar 0,1 persen per tahun dan pada periode 2000-2004 meningkat tajam menjadi 2,3 persen per tahun). Penurunan *employment rate* tersebut berdampak terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Penurunan *employment rate* tersebut mencerminkan kesempatan kerja yang ada kurang mampu menyerap pertambahan angkatan kerja yang masuk pasar kerja.

**Gambar 2.3: Proporsi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin.**





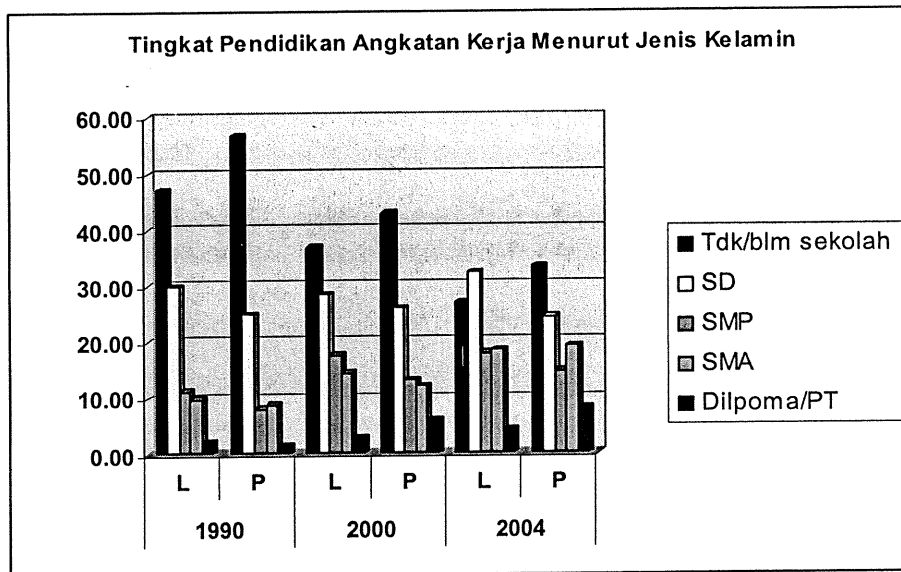
Berdasarkan jenis kelamin, angkatan kerja laki-laki lebih banyak masuk ke pasar kerja dibandingkan perempuan (lihat Gambar 3.3). Tanggungjawab laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah dalam keluarga menyebabkan laki-laki harus terjun ke pasar kerja. Perempuan yang masuk pasar kerja cukup besar, yaitu sekitar dua pertiga dari laki-laki. Selain untuk membantu menambah pendapatan keluarga, diduga masuknya perempuan ke pasar kerja juga disebabkan meningkatnya tingkat pendidikan perempuan sehingga ada keinginan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Ada kecenderungan peningkatan angkatan kerja laki-laki selama periode 1990-2004, sebaliknya proporsi perempuan menunjukkan penurunan.

### *Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja*

Tingkat pendidikan angkatan kerja mencerminkan kualitas penduduk yang masuk ke pasar kerja. Secara umum ada peningkatan kualitas angkatan kerja selama periode 1990-2004. Selama periode tersebut ada kecenderungan penurunan proporsi angkatan kerja yang berpendidikan tidak atau belum sekolah. Namun angkatan kerja yang berpendidikan SD kelihatannya masih tinggi meski ada sedikit penurunan pada tahun 2000 namun meningkat lagi pada tahun 2004. Perbedaan sumber data memungkinkan peningkatan ini. Selama periode 1990-2004, terjadi peningkatan proporsi angkatan kerja yang berpendidikan SMP keatas. Selama periode 1990-2000, peningkatan yang cukup besar terdapat pada tingkat pendidikan SMP, yaitu dari 10 persen menjadi 16 persen. Sedangkan untuk SMA terjadi peningkatan cukup besar yaitu 9 persen (1990) menjadi 13 persen (2000) dan 19 persen (2004). Begitu juga untuk tingkat Akademi/Perguruan Tinggi terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama periode 1990-2004, yaitu 2 persen (1990), 4 persen (2000) dan 6 persen (2004). Hal ini menunjukkan meningkatnya kualitas angkatan kerja (Lampiran 6).

Berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa ada kecenderungan peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan. Selama periode 1990-2006, untuk tingkat SMA dan Akademi/PT terjadi peningkatan yang signifikan bahkan pada tahun 2004 proporsi angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Begitu juga angkatan kerja perempuan yang berpendidikan Akademi/PT mengalami peningkatan pada tahun 2000 dan 2004 proporsi angkatan kerja perempuan lebih besar dari laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas perempuan yang masuk ke pasar kerja baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan semakin tinggi. Secara umum kondisi ini mencerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Solok.

**Gambar 2.4: Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin**



Berdasarkan kelompok umur, terjadi penurunan tenaga kerja anak-anak (10-14 tahun). Begitu juga angkatan kerja usia 15-19 tahun cenderung mengalami penurunan (Lampiran 7). Penduduk yang berusia 10-19 tahun merupakan kelompok umur sekolah sehingga dengan adanya penurunan proporsi angkatan kerja pada kelompok umur tersebut mencerminkan adanya peningkatan partisipasi sekolah. Angkatan kerja yang berumur 20 sampai 29 tahun mengalami peningkatan selama periode 2000-2004. Kemungkinan mereka adalah pencari kerja yang baru keluar dari dunia pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan adanya variasi dan tidak ada pola atau kecenderungan yang mencolok antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan.

# BAB III

## PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA

### Pengantar

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan. Semakin meningkat kegiatan ekonomi, maka permintaan tenaga kerja juga semakin meningkat. Keterkaitan ini dapat dijelaskan dalam model produksi Cobb Douglass (Dernber and Mc Dougall, 1972), tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu kegiatan ekonomi. Kebijakan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja, sehingga tercipta keadaan yang mengarah pada *full employment*. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan perluasan dunia usaha yang akan menciptakan kesempatan kerja baru.

Perkembangan ekonomi secara makro dalam bentuk kenaikan Produk Domestik Regional Bruto pada sektor-sektor ekonomi biasanya disertai dengan pergeseran struktur produksi dan penggunaan sumber daya manusia dan modal. Hal ini tercermin antara lain: pertama meningkatnya kuantitas dan kualitas stok barang modal per tenaga kerja; kedua meningkatnya pendidikan formal dan non formal dari tenaga kerja serta makin baiknya sarana dan prasarana (Ananta, 1998). Bagian ini akan melihat perkembangan perekonomian dan kesempatan kerja di Kabupaten Solok serta faktor-faktor yang berpengaruh. Pembahasan juga akan melihat investasi sebagai faktor yang sangat penting dalam perekonomian selain tenaga kerja.

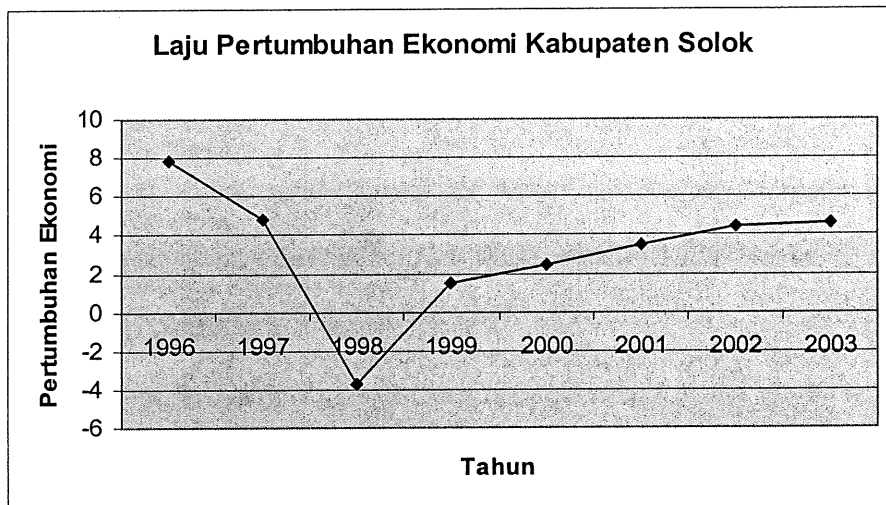
### 3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi yang ada pada suatu daerah. Dengan kata lain, perkembangan nilai tambah masing-masing sektor ekonomi selama periode tertentu mencerminkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik

atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan akan memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan perubahan struktur perekonomian.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Solok tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Anjloknya nilai tukar rupaiah serta naiknya harga barang dan jasa menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok mengalami penurunan sampai -3,74 persen pada tahun 1998 (lihat gambar 3.1). Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok disebabkan oleh pertumbuhan negatif hampir semua sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian dan jasa-jasa. Berdasarkan harga konstan 1993, kontribusi sektor pertanian mengalami peningkatan dari 35,3 persen tahun 1997 menjadi 37,44 persen pada tahun 1998, begitu juga pada sektor jasa-jasa yang meningkat dari 17,21 persen menjadi 18,64 persen. Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk di Kabupaten Solok tidak terpengaruh oleh dampak krisis karena sedikit menggunakan bahan baku impor sehingga mampu menyelamatkan perekonomian daerah ini selama krisis.

**Gambar 3.1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok 1996-2003**

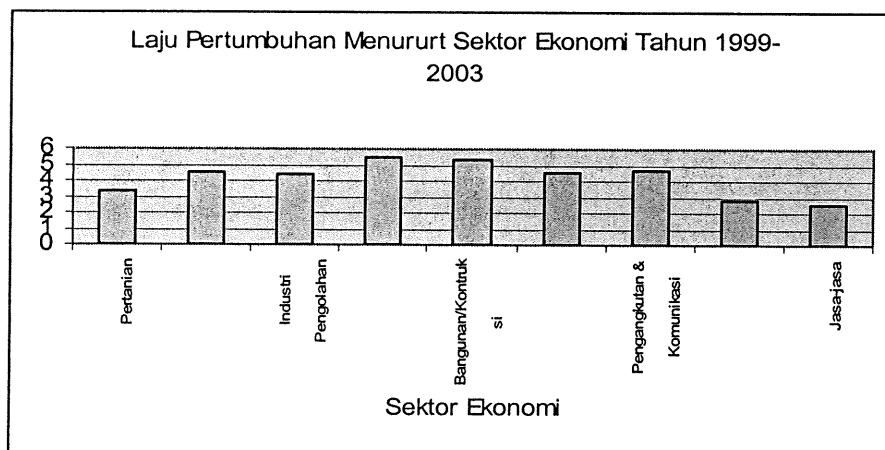


Seiring dengan upaya pemulihan perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional, perekonomian Kabupaten Solok mulai pulih dari krisis pada tahun 1999 dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi positif.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan pada beberapa sektor, terutama sektor pertanian yang meningkat cukup besar dari 37,44 persen tahun 1989 menjadi 38,08 pada tahun 1999. Didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan pertanian yang cukup luas untuk dapat diolah oleh masyarakat, maka sektor pertanian dapat menjadi andalan perekonomian Kabupaten Solok pada saat terjadi krisis ekonomi. Sementara itu, kontribusi sektor pertambangan, keuangan dan bangunan masih mengalami penurunan pada tahun 1999. Kelihatannya ketiga sektor ini membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat pulih dari pengaruh krisis ekonomi.

Selama periode 1999- 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1,52 persen pada tahun 1999 terus meningkat sampai 4,61 pada tahun 2003 meskipun masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi sebelum krisis (lihat gambar 3.2). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok merupakan sumbangan dari laju pertumbuhan yang tinggi pada sektor Listrik, Gas dan Air bersih serta sektor Bangunan, diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Perdagangan. Tingginya laju pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air bersih dan sektor Bangunan kemungkinan berkaitan dengan pesatnya pembangunan fisik sebagai persiapan pemekaran kabupaten ini menjadi Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Meskipun output yang dihasilkannya masih kecil namun sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sangat penting untuk pengembangan sektor lainnya yang cukup potensial untuk menciptakan kesempatan kerja, seperti pada Industri Pengolahan.

**Gambar 3.2: Laju Pertumbuhan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 1999-2003**



### 3.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah menggambarkan besarnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB) juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi. Biasanya pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa diikuti oleh pergeseran struktur ketenagakerjaan. Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Solok masih tergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian mampu memberi kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten Solok meskipun ada kecenderungan penurunan selama periode 1990-2004. Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 1990 sektor pertanian memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 54,04 kemudian turun menjadi 41,85 persen pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 41,93 persen pada tahun 2004. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan adanya penurunan kontribusi dari subsektor tanaman pangan, kehutanan dan perikanan.

Selain sebagai sumber pendapatan daerah, sektor pertanian mampu memberi lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di Kabupaten Solok. Pada tahun 1990 kesempatan kerja yang disediakan oleh sektor pertanian adalah sebesar 79,5 persen turun menjadi 69,5 persen pada tahun 2000 dan 67,5 persen pada tahun 2004. Penurunan kontribusi dan kesempatan kerja sektor pertanian ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah mengingat sektor pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Solok. Selama kurun waktu 2000 sampai 2004 struktur ekonomi Kabupaten Solok tidak banyak mengalami perubahan, perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian diikuti sektor perdagangan dan jasa.

Kontribusi sektor pertanian sebagian besar disumbangkan oleh subsektor tanaman pangan dan hortikultura meskipun terdapat kecenderungan penurunan kontribusi dari subsektor tanaman pangan dan hortikultura, yaitu 43,21 persen tahun 1990, 33,92 persen tahun 2000 dan 32,98 persen pada tahun 2004 (Lampiran 8). Subsektor tanaman pangan dan palawija, dengan komoditi beras, buah-buahan (markisah, alpukat dsb) dan sayuran (cabe, bawang, kentang, kol), menjadi andalan bagi perekonomian di Kabupaten Solok. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Solok, pada tahun 2005 produksi buah-buahan terbesar adalah Markisah dengan jumlah produksi 1.020.474 kwintal, diikuti buah Alpukat dan Pisang. Hasil pertanian menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Solok.

**Tabel 3.1: Kontribusi PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi.**

Sektor/Lapangan	Kontribusi PDRB			Penyerapan Tenaga Kerja		
	1990	2000	2004	1990	2000	2004
Pertanian	54.04	41.85	41.93	79.5	69.5	67.5
Pertambangan & Penggalian	0.8	3.39	3.69	0.5	0.9	0.4
Industri	5.19	7.2	7.3	1.5	3.4	3.2
Listrik, gas dan air	0.55	0.36	0.52	0.1	0.4	0.0
Bangunan	3.27	5.13	5.49	2.3	2.8	1.5
Perdagangan	18.42	14.08	14.45	7.1	12.4	12,0
Transportasi	4.91	9.63	10.22	1.3	2.3	4.2
Kuangan	3.83	2.12	2.07	0.3	0.5	0.7
Jasa	9.01	16.23	14.33	7.2	7.8	10.5
Lainnya				0.2	0	0
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0

Sumber: - PDRB kabupaten Solok 1989-2004  
 - Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004 (Data diolah)

Pentingnya sektor pertanian mendorong pemerintah membuat suatu kawasan Agropolitan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Lembah Gumanti dan Danau Kembar, serta 5 kecamatan penyangga yaitu kecamatan Gunung Talang, Lembah Jaya, Bukit Sundi, Hiliran Gumanti, Payung Sekaki dan Pantai Cermin (Dinas Pertanian dan Perikanan, 2006). Selain subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan dengan komoditi teh, kopi, kelapa sawit cukup penting dalam perekonomian di Kabupaten Solok. Sebagian besar perkebunan yang ada merupakan perkebunan besar milik perusahaan swasta. Setelah adanya pemekaran dengan Kabupaten Solok Selatan sebagian besar perkebunan swasta masuk wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Hasil pertanian disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga diekspor ke daerah lain di Indonesia, seperti Pakan Baru, Batam bahkan ke luar negeri seperti Malaysia, Brunai dan Singapura. Pemasaran hasil pertanian dilakukan oleh para pengumpul dan eksportir yang kebanyakan berada di Kota Solok. Begitu juga pengolahan hasil pertanian sebagian dilakukan di Kota Solok. Dalam hal ini, Kabupaten Solok adalah sebagai penghasil (hulu) sedang industri hilirnya kebanyakan berada di Kota Solok dan kota lainnya. Oleh karena itu, pendapatan yang diperoleh Kabupaten Solok dari hasil pertanian belum maksimal terutama pendapatan dari pengolahan dan perdagangan hasil pertanian. Sektor pengolahan hasil

pertanian (*agroindustri*) belum berkembang di Kabupaten Solok. Hal ini juga terjadi pada jumlah tenaga kerja yang dapat diserap dari kegiatan pasca panen. Dalam sistem pemasaran hasil pertanian seperti hasil perkebunan (cabe, bawang dsb), dilakukan oleh para pengumpul yang berasal dari luar seperti Kota Solok, Padang yang membeli langsung dari petani. Sistem pemasaran yang sangat dikuasai oleh pengumpul menyebabkan masyarakat tidak bisa masuk untuk ikut dalam sistem pemasaran.

Sektor Perdagangan merupakan sektor yang cukup penting bagi perekonomian Solok dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian. Pada tahun terhadap PDRB sebesar 14,08 persen pada tahun 2000 menjadi 14,45 persen pada tahun 2004 dengan kontribusi terbesar pada subsektor perdagangan besar dan eceran. Masyarakat di Kabupaten Solok khususnya dan Sumatera Barat umumnya terkenal dengan jiwa dagangnya. Pekerjaan sebagai pedagang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah ini, baik pedagang besar maupun pedagang kaki lima. Bahkan oleh masyarakat yang ada di perantauan sehingga bekerja sebagai pedagang sudah melekat bagi masyarakat Suku Minang. Kesempatan kerja di sektor perdagangan didukung oleh perkembangan sektor pertanian karena sebagian besar hasil pertanian menjadi komoditi bagi usaha perdagangan, seperti sayuran, buah-buahan, beras solok dan sebagainya. Sayur-sayuran dikirim ke daerah lain seperti Pekanbaru, Batam, bahkan ke Malaysia, Singapura melalui agen pengumpul. Begitu juga hasil perikanan seperti ikan danau Singkarak (ikan bilis) dijual ke Tanjung Pinang, Batam, Pekanbaru dan Malaysia.

Sektor pengangkutan menunjukkan peningkatan yang cukup besar selama periode 1990-2004. Kontribusi sektor pengangkutan meningkat dari 4,91 persen tahun 1990 menjadi 9,63 persen tahun 2000 dan 10,22 persen pada tahun 2004. Sektor pengangkutan berkembang seiring dengan semakin maraknya pemasaran hasil pertanian yang menggunakan truk untuk membawa hasil pertanian dari petani. Disamping itu seiring dengan semakin mudahnya mendapatkan motor dengan cara kredit maka banyak bermunculan jasa ojek sebagai sarana transportasi sampai ke desa-desa.

Sektor yang cukup potensial di Kabupaten Solok adalah sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari 5,19 persen tahun 1990 naik 7,20 persen tahun 2000 dan 7,30 tahun 2004. Meskipun kontribusinya relatif kecil karena sebagian besar industri yang ada masih dalam skala industri kecil dan rumah tangga namun jumlahnya cukup besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Jenis industri yang ada antara lain industri pangan, sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronik dan industri



bangunan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Kabupaten Solok tahun 2005, industri yang paling banyak adalah industri kerajinan (609 unit) diikuti industri pangan (499 unit), industri kimia dan bahan bangunan (362 unit), industri logam dan elektronik (117 unit) dan industri sandang (102 unit). Penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada industri kerajinan diikuti industri kimia dan bahan bangunan dan industri pangan. Dalam hal ini, sektor industri cukup potensial bagi perekonomian di Kabupaten Solok mengingat bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku lokal. Sementara kontribusi sektor ekonomi lainnya masih dibawah 10 persen namun kontribusinya mengalami peningkatan kecuali sektor keuangan.

### **3.3. Investasi**

Investasi atau penanaman modal sangat diperlukan dalam pembangunan, selain untuk menggerakkan roda perekonomian (pertumbuhan ekonomi), juga untuk menciptakan kesempatan kerja baru. Dalam hal ini, peningkatan investasi merupakan salah satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran, terutama investasi swasta. Investasi yang ditanamkan terdiri dari investasi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Secara umum, tingkat investasi di Kabupaten Solok relatif kecil. Selama tahun 2003-2004 jumlah investasi mengalami penurunan dari 873 milyar tahun 2003 menjadi Rp. 679 pada tahun 2004. Investasi yang telah ditanamkan di Kabupaten Solok sebagian besar berasal dari investasi masyarakat. Pada tahun 2003, sekitar 74 persen dari total investasi berasal dari masyarakat kemudian turun menjadi 60 persen pada tahun 2004. Sebaliknya investasi yang berasal dari pemerintah mengalami peningkatan. Pemekaran wilayah yang membutuhkan sejumlah sarana dan prasarana pemerintahan menyebabkan adanya peningkatan investasi pemerintah. Investasi dari sektor swasta relatif kecil yaitu Rp. 28,1 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp. 28,9 milyar pada tahun 2004 (Pemerintah Kab. Solok, 2006). Investasi yang ditanamkan pihak swasta sebagian besar di sektor perkebunan (kelapa sawit, teh, kopi) dan disektor pertambangan (biji besi, batu bara, emas). Biji besi adalah komoditi pertambangan yang cukup potensial. Sampai tahun 2005 telah dikeluarkan sebanyak 18 izin pertambangan biji besi.

Investasi yang berasal dari masyarakat salah satunya adalah dalam bentuk pengiriman uang dari masyarakat Kabupaten Solok yang ada rantau. Seperti diketahui bahwa 'merantau' atau bermigrasi ke Jakarta dan kota lainnya di seluruh Indonesia bahkan keluar negeri seperti Malaysia sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu. Hampir semua daerah di Sumatera Barat

penduduknya pergi merantau. Meskipun sebagian masyarakat minang ada di perantauan namun keterikatan dan perhatian terhadap keluarga dan kampung halaman masih kuat. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana untuk pembangunan kampung halaman. Melalui Gebu Minang (Gerakan 1000 Minang) perkumpulan masyarakat minang yang ada di perantauan mengumpulkan uang untuk pembangunan di kampung, seperti membangun Mesjid, jalan desa dan sebagainya. Penyaluran dana dari rantau juga dilakukan melalui keikutsertaan modal di BPR, Bank Nagari atau lembaga keuangan lainnya.

Kiriman uang bagi keluarga digunakan untuk membangun rumah, ternak sapi atau kebun yang diurus oleh keluarga yang ada dikampung dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai contoh, suatu daerah di Kabupaten Solok yaitu Nagari Sulit Air, dimana sekitar 75 persen penghasilan nagari tersebut berasal dari perantauan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga ada istilah 'penghasilan wesel'. Disatu sisi pengiriman uang dari rantau dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, akan tetapi sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumtif tidak diinvestasikan untuk kegiatan produktif sehingga dampaknya terhadap perluasan kesempatan kerja relatif kecil.

Kendala yang dihadapi investor dalam menanamkan modalnya adalah masalah status lahan. Sebagian besar lahan masyarakat masih berstatus hal ulayat atau 'tanah pusako' yang dimiliki oleh beberapa orang dalam satu keturunan. Pembebasan lahan ini menjadi kendala bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Solok. Berdasarkan informasi ada investor tidak melanjutkan usahanya meskipun semua perizinan sudah ada karena tersangkut masalah hak ulayat lahan. Selama ini peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan tanah hanya sebatas sebagai mediator antara investor dengan masyarakat/pemilik tanah. Untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Solok maka masalah tanah ulayat perlu mendapat perhatian khusus karena hampir tidak ada investasi yang tidak bersentuhan dengan tanah, baik investasi dibidang industri maupun pertanian. Pada umumnya tanah di Kabupaten Solok dan Sumatera Barat khususnya adalah milik ulayat, baik ulayat suku, ulayat kaum maupun ulayat nagari (Karimi, 2001). Adat dan budaya Minangkabau memberi kesempatan luas bagi pemanfaatan tanah ulayat namun tidak boleh merubah status kepemilikan karena termasuk harta pusako tinggi. Hal ini disatu sisi hal ini dapat menjaga keberlanjutan dalam pemilikan sumber daya bagi kelangsungan hidup anak kemenakan secara turun temurun. Namun disisi lain, hal ini kurang kondusif bagi iklim investasi dari pihak swasta.

Kendala lainnya yang berkaitan dengan masuknya investasi swasta adalah belum adanya badan khusus, seperti Badan Penanaman Investasi Daerah (BPID) yang mengurus masalah investasi. Selain masalah birokrasi seperti masalah perizinan penanaman modal, hal ini juga berpengaruh pada kurangnya sosialisasi mengenai potensi Sumber Daya Alam yang dapat diolah oleh pihak swasta.



## **BAB IV**

# **PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENGANGGURAN**

### **Pengantar**

Perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di pasar kerja ditentukan oleh perkembangan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini, peningkatan pembangunan pada sektor ekonomi dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sehingga semakin tinggi pertumbuhan sektor ekonomi maka daya serap tenaga kerja juga semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah angkatan kerja yang masuk kerja apabila tidak diiringi peningkatan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan, yaitu meningkatkan angka pengangguran atau bahkan mobilitas angkatan kerja ke luar Kabupaten Solok.

Bagian ini akan membahas mengenai masalah penyerapan tenaga kerja dan masalah pengangguran. Penyerapan tenaga kerja akan melihat perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ekonomi dan bagaimana karakteristik tenaga kerja yang bekerja. Sedang pengangguran akan melihat jumlah dan perkembangan penganggur dan bagaimana karakteristik tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja tersebut. Data yang digunakan dalam bagian ini adalah subset data Sensus Penduduk 1990, 2000 dan 2004. Meskipun ada perbedaan batasan umur tenaga kerja pada ketiga sumber data tersebut, dalam tulisan ini konsep tenaga kerja yang digunakan adalah penduduk berumur 10 tahun keatas.

### **4.1. Penyerapan tenaga kerja**

Sehubungan dengan potensi wilayah dan sektor unggulannya adalah pertanian, maka sebagian besar (67,5 persen tahun 2004) tenaga kerja di Kabupaten Solok masih terserap di sektor pertanian. Sektor pertanian tersebut utamanya pertanian tanaman pangan, yaitu usaha pertanian persawahan, baik sawah irigasi teknis, setengah teknis maupun tadah hujan. Komoditi yang paling populer adalah padi/ beras. Bahkan beras solok (*barek solok*) sangat terkenal sampai luar Sumatera Barat dan dijual sampai luar provinsi, hanya harganya sedikit lebih mahal (25%) dibandingkan dengan jenis beras lain di luar Kabupaten Solok. Tanaman padi tersebut ditanam di daerah dataran rendah. Kemudian setelah petani padi berikutnya adalah

petani sayur-mayur (*hortikultura*), buah dan hasil perkebunan. Tanaman ini biasanya ditanam oleh petani di daerah pegunungan/ dataran tinggi. Jenis sayurannya antara lain boncis, kol, wortel, bawang merah, bawang putih, kapri dsb. Petani buah umumnya menghasilkan buah markisa, pisang dan mangga. Sedang petani kebun menghasilkan coklat, kopi dan karet. Kemudian ada petani ubi dan jagung, petani ubi menghasilkan ubi jalar dan kentang.

**Tabel 4.1: Lapangan Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Solok, Tahun 1999 – 2004 (Persen)**

<b>SEKTOR/ LAPANGAN KERJA</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2004</b>
<b>Sektor Pertanian (A)</b>	<b>79,5</b>	<b>69,5</b>	<b>67,5</b>
<b>Sektor Manufaktur (M)</b>	<b>4,4</b>	<b>7,5</b>	<b>5,1</b>
Pertambangan & Penggalian	0,5	0,9	0,4
Industri	1,5	3,4	3,2
Listrik, Gas & Air	0,1	0,4	0,0
Bangunan	2,3	2,8	1,5
<b>Sektor Jasa (S)</b>	<b>16,1</b>	<b>23,0</b>	<b>27,4</b>
Perdagangan	7,1	12,4	12,0
Transportasi	1,3	2,3	4,2
Keuangan	0,3	0,5	0,7
Jasa	7,2	7,8	10,5
Lainnya	0,2	0,0	0
<b>Jumlah (N)</b>	<b>100,0 (172.961)</b>	<b>100,0 172.052</b>	<b>100,0 178.140</b>

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS ( Data diolah)

Setelah sektor pertanian, sektor perdagangan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja (12 persen tahun 2004) meskipun tidak sebanyak pertanian. Namun perdagangan yang diusahakan tersebut pada umumnya adalah perdagangan hasil pertanian. Sebab Solok terkenal dengan hasil usaha pertaniannya. Hal tersebut tercermin dari banyaknya kendaraan truk-truk yang tiap hari keluar masuk Solok untuk mengangkut hasil produksi pertanian dan perkebunan daerah ini. Kemudian di sektor jasa, jumlah tenaga kerja yang terserap juga cukup besar. Namun sebagian besar tenaga kerja tersebut masih terserap di pemerintahan, sebagai karyawan/karyawati.

Di sektor pertambangan, meskipun Kabupaten Solok ada potensi tambang, namun belum banyak dieksploitasi. Deposit tambang yang ada di kabupaten ini adalah bijih besi, batu bara dan tembaga. Sampai saat ini masih kecil jumlah tenaga kerja yang terserap di pertambangan (0,4 persen tahun 2004). Sebab usaha eksploitasi tambang di kabupaten ini masih sangat terbatas.

Di sektor industri pengolahan, tenaga kerja yang terserap masih sangat kecil, yaitu 3,2 persen pada tahun 2004. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Solok sebagian besar adalah industri rumah tangga. Jumlah tenaga kerja yang terserap masih kecil dan sebagian besar masih anggota rumah tangga sendiri. Industri rumah tangga yang ada antara lain industri pengolahan kopi, industri meubel, industri bourdir dan industri pengolahan ubi kayu (kerupuk). Hasil produksi industri tersebut sudah dijual ke luar kabupaten.

Sektor jasa cukup potensial dalam menyerap tenaga kerja dimana terjadi peningkatan dari 7,2 persen tahun 1990, menjadi 7,8 persen tahun 2000 dan 10,5 persen tahun 2004. Jenis pekerjaa yang cukup berkembang adalah usaha bengkel dan ojek motor. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok, dari 167 orang lulusan BLK yang berhasil dimonitor, sebanyak 106 orang atau 63,5 persen yang terserap di pasar kerja. Lulusan pelatihan ketrampilan yang banyak terserap di pasar kerja adalah kejuruan menjahit (63,6 persen) dimana kejuruan ini banyak didominasi oleh perempuan (Lampiran 9). Mereka yang bekerja pada bengkel sepeda motor cukup tinggi yaitu 61,1 persen. Dengan semakin tingginya pertumbuhan pemakai kendaraan roda dua, maka kondisi tersebut membuka peluang banyaknya bengkel sepeda motor yang dibutuhkan dan untuk itu diperlukan tenaga yang telah memiliki ketrampilan di bidang tersebut.

Selama 14 tahun terakhir ada kecenderungan pergeseran struktur ketenagakerjaan antar sektor di Kabupaten Solok, yaitu dari sektor tradisional ke sektor modern atau dengan kata lain telah mulai adanya transisi dari sektor ekonomi tradisional (Sektor A) ke sektor modern (Sektor M dan S). Di sektor tradisional atau sektor A (pertanian) sudah ada kecenderungan proporsinya makin menurun, meskipun belum begitu tajam penurunannya. Sedangkan di sektor modern ada kecenderungan meningkat, meskipun belum begitu besar. Di sektor M perubahannya memang masih sangat kecil sekali, ini menunjukkan bahwa perkembangan di sektor manufaktur/ industri pengolahan di Kabupaten Solok ini masih sangat lambat. Dari beberapa informasi dari dinas yang berwenang membina sektor ini memang mengakui bahwa perkembangan sektor ini masih sangat kurang. Sebagian besar sektor industri pengolahan masih merupakan industri rumah tangga dan masih merupakan usaha sampingan di luar usaha pertanian. Industri-industri

tersebut umumnya merupakan pengolahan hasil pertanian. Industri rumah tangga tersebut antara lain : pengolahan kopi, kerupuk singkong, kerupuk ubi, pembuatan rendang, dan pengeringan ikan danau. Umumnya usaha tersebut sebagai usaha sampingan dan pemasarannya masih pemasaran setempat, meskipun ada yang sudah menjual ke luar kabupaten.

Perubahan yang agak jelas adalah di sektor S (*services*). Dari sektor tersebut yang perkembangannya cukup mencolok adalah perdagangan, angkutan dan jasa pemerintahan. Tenaga kerja perdagangan yang mencolok adalah perdagangan hasil pertanian, baik hasil bahan makanan pokok maupun sayur mayur dan buah. Beras dan sayur mayur melimpah dan dipasarkan sampai ke luar Kabupaten Solok dan luar Provinsi Sumatera Barat. Kemudian peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor angkutan makin mencolok. Hal ini sehubungan dengan makin banyaknya pelayanan angkutan umum, seperti tukang ojek dan kendaraan umum roda empat (termasuk angkutan kota). Dengan demikian makin banyak tenaga kerja yang terserap di sektor ini. Jenis pekerjaan di sektor ini merupakan pekerjaan yang lebih bergensi dan bersih dari pada sebagai petani atau buruh tani. Sektor jasa pemerintahan juga meningkat sebagai akibat adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut meningkat. Lowongan kerja tersebut telah diisi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini yang menyebabkan tenaga kerja di sektor jasa pemerintahan juga meningkat.

Dari kajian status pekerjaan tenaga kerja juga membuktikan atau mendukung adanya transisi perekonomian tersebut dari sektor tradisional ke sektor yang lebih modern. Hasil studi menunjukkan bahwa ternyata proporsi tenaga kerja yang statusnya sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja tak dibayar ada kecenderungan makin menurun. Sebaliknya proporsi jumlah tenaga kerja yang statusnya sebagai buruh/ karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap makin meningkat. Dari temuan tersebut makin memperkuat fakta bahwa di Kabupaten Solok sedang mengalami perubahan/ pergeseran dalam perekonomian dan ketenagakerjaan selama 14 tahun terakhir.



**Tabel 4.2 : Status Pekerjaan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, 1999 – 2004 (Persen)**

NO	STATUS PEKERJAAN	1990	2000	2004
1.	Berusaha sendiri	20,6	29,4	27,7
2.	Berusaha dibantu buruh tak tetap	35,8	23,9	13,7
3.	Berusaha dengan buruh tetap	1,0	1,8	4,6
4.		18,2	23,5	35,7
5.	Buruh/ karyawan Pekerja tak dibayar	24,4	21,4	18,3
	Jumlah (N)	100,0 (172.961)	100,0 172.052	100,0 178.140

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS ( Data diolah)

#### *Pendidikan angkatan kerja bekerja*

Tingkat pendidikan dapat mencerminkan kualitas tenaga kerja. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka semakin berkualitas tenaga kerja tersebut. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Solok secara umum masih ditandai dengan rendahnya kualitas tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja masih berpendidikan SD kebawah. Kondisi ini terdapat pada semua sektor ekonomi terutama di sektor pertanian. Namun adanya kecenderungan di mana makin tinggi pendidikan makin banyak yang bekerja di sektor modern, terutama di sektor S dan M. Hanya di sektor M kecenderungan tersebut belum begitu mencolok. Hal ini disebabkan belum semua sektor M tersebut merupakan sektor formal atau modern. Kebanyakan tenaga kerja tersebut yang hanya bekerja di industri-industri rumah tangga yang jenis pekerjaannya tidak menuntut latar belakang pendidikan tinggi.

Tren perubahan tenaga kerja menurut pendidikannya dari tahun 1990 sampai tahun 2004, ada kecenderungan terus meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi makin meningkat, sedangkan yang berpendidikan rendah makin menurun. Selanjutnya juga ada kecenderungan yang berpendidikan tinggi makin tertarik ke sektor S atau sektor modern. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Solok.

Tenaga kerja pada sektor pertanian yang menjadi unggulan di Kabupaten Solok, selama periode 1990-2004 relatif mengalami peningkatan pendidikan meskipun relatif kecil. Tenaga kerja yang berpendidikan SMA terjadi peningkatan meskipun sedikit, yaitu 4,5 persen tahun 1990 menjadi 5,4 persen pada tahun 2000 dan 6,2 persen pada tahun 2004. Kemungkinan hal ini terjadi pada subsektor perkebunan. Berbeda dengan pekerjaan di sawah, pekerjaan di perkebunan masih banyak diminati oleh para generasi muda yang berpendidikan SMA. Berdasarkan informasi dari petani sayuran (kol, cabe dan bawang) di Nagari Danau Kembar dapat diketahui bahwa para anak petani masih beminat dan mau membantu orang tua ke kebun. Menurut salah seorang anak petani yang hampir menamatkan sekolahnya di STM:

*'biasanya anak muda yang baru tamat sekolah SMA dan Universitas biasanya pergi mencari kerja ke kota lain, jika tidak dapat baru pulang bantu orang tua di kebun. Namun selama sekolah juga membantu orang tua di kebun'*

Kelihatannya bentuk pekerjaan dan proses mendapatkan hasil dari pekerjaan di pertanian berpengaruh pada kemauan anak untuk terjun ke pertanian. Kelihatannya pekerjaan di kebun lebih bersih dan prosesnya telatif lebih singkat dibandingkan pekerjaan padi disawah. Disamping itu, jangka waktu antara proses pasca panen dan penjualan (mendapatkan uang) tidak lama. Hasil kebun seperti cabe, kol langsung dapat dijual setelah dipanen atau bawang setelah dijemur langsung dapat dijual dan pembelinyapun sering datang tanpa mengeluarkan ongkos transport. Hal seperti ini dapat menjadi faktor penarik bagi generasi muda untuk bekerja di pertanian. Sementara pekerjaan tanaman padi banyak dilakukan oleh para orang tua, bahkan sekarang sering kekurangan tenaga kerja sehingga didatangkan dari luar terutama tenaga kerja yang berasal dari daerah yang lahannya kurang subur.

Untuk tingkat Diploma dan Perguruan Tinggi terjadi penurunan dari 0,4 persen menjadi 0,1 persen (tabel 4.3). Hal ini menunjukkan bahwa ada persepsi dikalangan generasi muda bahwa pekerjaan disektor pertanian tidak cocok dengan tingkat pendidikan Diploma dan Perguruan Tinggi sehingga mereka yang berpendidikan tinggi kebanyakan mencari pekerjaan disektor formal baik di Kabupaten Solok maupun keluar Solok. Mobilitas keluar kabupaten dan provinsi bagi tenaga kerja terdidik cukup besar, hal ini didukung oleh terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal di Kabupaten Solok.

**Tabel 4.3.: Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja Di Kabupaten Solok, 1999 – 2004 (Persen)**

Lapangan Pekerjaan	Tdk Sekolah/ Tdk Tamat SD	SD	SMP	SMA	Diploma/ PT	Jumlah
<i>Tahun 1990 :</i>						
• A	57,6	28,7	8,8	4,5	0,4	100,0 (137.595)
• M	40,3	31,3	12,2	15,8	0,4	100,0 (7.554)
• S	23,7	24,4	14,0	29,3	8,6	100,0 (27.812)
Jumlah	51,4	28,1	9,8	9,0	1,7	100,0 (172.961)
<i>Tahun 2000 :</i>						
• A	49,3	30,8	14,4	5,4	0,1	100,0 (119.668)
• M	32,3	24,9	21,9	19,7	1,2	100,0 (12.857)
• S	15,4	18,6	19,7	31,4	14,9	100,0 (39.527)
Jumlah	40,2	27,6	16,2	12,4	3,6	100,0 (172.052)
<i>Tahun 2004 :</i>						
• A	38,8	37,7	17,2	6,2	0,1	100,0 (120.171)
• M	24,7	21,1	19,3	31,3	3,6	100,0 (9.165)
• S	13,5	17,0	13,9	36,6	19,0	100,0 (48.804)
Jumlah	31,0	31,2	16,4	15,8	5,5	100,0 (178.140)

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS ( Data diolah)

## 4.2. Pengangguran

Pada bagian ini akan menganalisis pengangguran tenaga kerja di Kabupaten Solok. Pembahasan akan melihat bagaimana perkembangan pengangguran dan siapa yang menganggur (pendidikan, umur dan jenis kelamin), serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Analisis pengangguran dibedakan menurut jenis pengangguran, yaitu pengangguran terbuka (*open employment*) dan setengah pengangguran. Kedua jenis pengangguran ini merupakan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia. Data yang digunakan dalam bagian ini adalah data SP 1990, 2000 dan Susenas tahun 2004.

### 4.2.1 Pengangguran Terbuka

#### *Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka*

Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran selama periode 1990-2004 di Kabupaten Solok terus mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran

terbuka meningkat dari 1,47 persen tahun 1990, menjadi 3,17 persen pada tahun 2000 dan 8,49 persen pada tahun 2004 (tabel 4.4). Peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja bertambah terus melebihi jumlah kebutuhan tenaga kerja. Penciptaan kesempatan kerja bagi pencari kerja merupakan permasalahan yang cukup sulit dihadapi ditengah kondisi perkenomian yang kurang menentu. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Masalah ini menjadi semakin berat karena bertambahnya pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja dari tahun ketahun.

**Tabel 4.4. : Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Solok Tahun 1990, 2000 dan 2004.**

Jumlah/Tingkat Pengangguran	1990	2000	2004
Jumlah Pengangguran (orang)			
L	1.080	4.133	8.265
P	1.494	1.507	8.271
L+P	2.574	5.640	16.536
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
L	1,02	3,75	6,67
P	2,13	2,22	11,7
L+P	1,47	3,17	8,49

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS ( Data diolah)

Tingkat pengangguran tenaga kerja yang cukup tinggi pada tahun 2004 dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama belum pulihnya kondisi perekonomian sebagai dampak krisis ekonomi pada tahun 1997. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang sekarang belum mampu menyerap sejumlah besar tenaga kerja yang menganggur akibat kolapsnya kondisi ekonomi akibat krisis. Kedua, kemungkinan mencoloknya tingkat penganggur pada tahun 2004 disebabkan oleh adanya perbedaan sumber data yang digunakan dibanding tahun 2000 dan 1999.

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Solok termasuk kategori rendah. Tingkat pengangguran yang rendah merupakan salah satu karakteristik negara berkembang. Penduduk di negara berkembang tidak bisa menganggur karena uang jaminan dan tunjangan sosial tidak

tersedia seperti di negara maju sehingga mereka akan melakukan pekerjaan apa saja untuk bisa makan. Pekerjaan informal sektor pertanian dan transportasi (tukang ojek) memberi banyak alternatif pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka yang benar-benar menganggur kemungkinan adalah mereka yang mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi mereka.

Ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan tenaga kerja disebabkan oleh banyak faktor. Disamping permintaan (biasanya pekerja terampil) lebih banyak daripada yang dibutuhkan seperti dapat dilihat pada bursa informasi pasar kerja di media cetak dan elektronik, juga adanya rintangan titik temu antara penganggur dengan yang membutuhkan tenaga kerja sehingga terjadi penumpukan pencari kerja di tempat tertentu dan di lain pihak mengalami kesulitan untuk mencari/memilih calon pekerja (Tukiran, 1995). Namun yang penting adalah permintaan tenaga kerja yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan faktor-faktor yang berpengaruh, seperti permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian yang dapat menggairahkan kegiatan produksi sehingga akhirnya permintaan tenaga kerja semakin bertambah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 1990 tingkat pengangguran perempuan sedikit lebih besar dari laki-laki. Sepuluh tahun berikutnya tahun 2000 tingkat penganggur laki-laki lebih besar dari perempuan, yaitu 3,75 persen laki-laki dan 2,22 persen perempuan. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh krisis yang menyebabkan banyak tenaga kerja terutama laki-laki kehilangan pekerjaannya. Sektor pertanian yang menjadi andalan di Kabupaten Solok atau industri kecil dan rumah tangga yang cukup berkembang menjadi lapangan pekerjaan yang cukup memadai bagi tenaga kerja perempuan. Hal tersebut memungkinkan rendahnya tingkat pengangguran perempuan. Kemudian pada tahun 2004 tingkat pengangguran perempuan meningkat tajam melebihi laki-laki yaitu 11,7 persen perempuan dan 6,67 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan kesempatan kerja untuk perempuan, terutama tenaga kerja perempuan seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan. Sementara bagi laki-laki, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sumber pendapatan utama dalam keluarga menyebabkan sulit bagi laki-laki untuk tidak bekerja.

#### *Penganggur Menurut Umur Dan Jenis Kelamin*

Tingkat penganggur terbuka atau pencari kerja banyak terdapat pada kelompok umur 15-29 tahun. Pada tahun 1990 sebanyak 77,6 persen penganggur berusia 15-29 tahun kemudian meningkat mejadi 85,8 persen

dan 86,2 persen pada tahun 2004 (tabel 4.5.). Proporsi tertinggi penganggur berada pada kelompok umur 20-24 tahun. Menumpuknya pencari kerja pada kelompok umur mengindikasikan bahwa pencari kerja adalah penduduk muda yang baru keluar dari dunia pendidikan yaitu tamat SMA dan Akademi/Perguruan Tinggi dan mulai memasuki dunia kerja. Biasanya mereka menganggur sambil memilih pekerjaan yang diminati, terutama pekerjaan disektor formal sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Menjadi pegawai negeri atau pekerjaan formal lainnya masih menjadi aspirasi para kaum muda di Kabupaten Solok.

Penganggur atau pencari kerja anak (10-14 tahun) cukup besar pada tahun 1990, terutama laki-laki (18 persen) anak-anak yang drop out. Pada tahun 2000 relatif sedikit dan 2004 mulai meningkat lagi. Kemungkinan adanya program wajib belajar enam sampai 9 tahun merupakan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya pencari kerja anak. Pada kelompok umur 30 tahun keatas proporsi pencari kerja makin sedikit. Tingkat pengangguran terbuka yang rendah terdapat pada tenaga kerja berumur 30 tahun keatas. Mereka pada umur tersebut diperkirakan sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab, terutama laki-laki. Sehingga sebagai sumber pencari nafkah keluarga tidak mungkin bagi mereka untuk menganggur. Banyak jenis pekerjaan terutama disektor informal pertanian yang dapat dengan mudah dimasuki karena tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu. Hal ini didukung oleh sumber daya lahan Kabupaten Solok yang potensi menghasilkan tanaman padi (Bareh Solok), buah-buahan dan sayuran. Kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian cukup besar. Permasalahannya adalah minat generasi muda untuk bekerja disektor pertanian, terutama tanaman pangan agaknya kurang. Berbeda dengan pekerjaan diperkebunan kelihatannya masih diminati oleh generasi muda. Jenis pekerjaan yang lebih rapi dan bersih dan proses mendapatkan uang dari hasil kebun relatif lebih cepat karena bisa langsung dijual pada pengumpul berpengaruh pada kemauan generasi muda untuk bekerja di kebun Sementara pekerjaan tanaman padi banyak dilakukan oleh para orang tua, bahkan sekarang sering kekurangan tenaga kerja sehingga didatangkan dari luar terutama tenaga kerja yang berasal dari daerah yang lahannya kurang subur.

**Tabel 4.5. Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Solok Tahun 1990, 2000 dan 2004**

Umur	1990			2000			2004		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
10 - 14	18,2	4,1	10,0	0	0	0	2,0	2,0	2,0
15 - 19	24,2	27,7	26,2	24,8	42,7	29,6	34,8	27,9	31,3
20 - 24	32,3	47,6	41,2	44,2	21,2	38,0	38,2	42,7	40,5
25 - 29	11,4	9,4	10,2	15,5	25,5	18,2	13,4	15,4	14,4
30 - 34	1,4	1,0	1,2	7,7	0	5,7	6,2	10,0	8,1
35 - 39	4,2	5,2	4,8	3,9	10,6	5,7	3,4	2,0	2,7
40 - 44	1,4	1,0	1,2	3,9	0	2,8	2,0	0	1,0
45 - 64	6,9	4,0	5,2	0	0	0	0	0	0
65 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>(N)</b>	<b>1.080</b>	<b>1.494</b>	<b>2.574</b>	<b>4.133</b>	<b>1.507</b>	<b>5.640</b>	<b>8.265</b>	<b>8.271</b>	<b>16.536</b>

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS ( Data diolah)

### *Tingkat Pendidikan Penganggur*

Menurut Blaug (1973), hubungan antara tingkat pengangguran dan pendidikan dapat digambarkan sebagai kurve U terbalik. Artinya tingkat pengangguran rendah pada mereka yang pendidikan rendah, seperti Sekolah Dasar kebawah, tertinggi pada mereka yang berpendidikan Sekolah Lanjutan (SLTP/SMA), selanjutnya tingkat pengangguran juga rendah pada mereka yang berpendidikan Diploma/Perguruan Tinggi. Kondisi tersebut tampaknya berbeda dengan yang dijumpai di Kabupaten Solok, baik kondisi tahun 1990, 2000 maupun 2004. Terlihat dengan jelas bahwa pada kelompok berpendidikan SD dan lebih rendah pengangguran lebih tinggi daripada kelompok yang berpendidikan SLTP (Tabel 4.5). Hal ini tidak terlihat pada kondisi tingkat pendidikan penganggur di Kabupaten Solok. Tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa proporsi terbesar penganggur terdapat pada mereka yang berpendidikan SMA dan ada kecenderungan peningkatan selama periode 1990-2004, yaitu 37persen tahun 1990, menjadi 47 persen tahun 2000 dan 50 persen pada tahun 2004. Menurut Suryadi, dilihat dari rata-rata masa tunggu (job search period) lulusan SMA umum termasuk yang paling lama sehingga terdapat proporsi yang cukup besar dari mereka yang harus menunggu pekerjaan selama lebih dari satu tahun.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan rendah, yaitu SMP kebawah cenderung lebih banyak terdapat pada pencari kerja laki-laki. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, Diploma/PT lebih banyak terdapat pada pencari kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang berpendidikan rendah lebih banyak memilih menganggur dari pada bekerja pada pekerjaan disektor tradisional. Sebaliknya perempuan yang

berpendidikan rendah cenderung melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya, seperti pekerjaan sektor informal.

Kesempatan kerja untuk mereka yang berpendidikan tinggi relatif sedikit. Kesempatan kerja yang ada lebih banyak tersedia untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan berpendidikan tinggi yang tidak terserap di pasar kerja. Pada tahun 2000, sebanyak 36 orang dari 100 orang perempuan yang berpendidikan Diploma/PT tidak terserap di pasar kerja kemudian turun menjadi 13 orang. Tingginya pengangguran tenaga kerja yang berpendidikan tinggi ini merupakan pemborosan sumber daya manusia yang menimbulkan ongkos sosial yang tinggi.

**Tabel 4.6. Proporsi Penganggur/Pencari Kerja Menurut Pendidikan Di Kabupaten Solok, 1990, 2000 dan 2004 (Persen)**

Tingkat Pendidikan	1990			2000			2004		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tdk/Blm Tamat SD	32,6	21,5	26,2	3,9	0	2,8	15,9	3,9	10,0
SD	15,5	9,0	11,7	23,3	21,4	22,8	15,4	5,9	10,7
SMP	23,9	15,5	19,0	5,4	10,6	6,8	21,9	19,9	20,9
SMA	22,3	47,7	37,0	51,9	31,9	46,6	43,3	56,7	50,0
Diploma/PT	5,7	6,3	6,1	15,5	36,2	21,0	3,4	13,4	8,4
Total	100 (1.080)	100 (1.494)	100 (2.574)	100 (4.134)	100 (1.507)	100 (5.640)	100 (8.265)	100 (8.271)	100 (16.536)

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004 (Data diolah)

Di Indonesia, hubungan antara pendidikan dengan pengangguran tenaga kerja merupakan gejala yang disebut '*structural unemployment*'. Jenis pengangguran seperti ini sama sekali bukan karena pendidikan belum dapat menyiapkan tenaga terampil karena ketrampilan terus berkembang tidak mungkin dibentuk oleh pendidikan yang relatif konstan. Ketrampilan hanya bisa dibentuk, dimodifikasi dan ditingkatkan di dalam suatu industri atau perusahaan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kaitan antara pendidikan dengan gejala pengangguran tenaga kerja terdidik dapat dikaji paling tidak dari tiga sudut pandang, yaitu: (1) Ketimpangan struktural antara persediaan dan kesempatan kerja, (2) Peranan swasta dalam pendidikan profesional/kejuruan yang belum berkembang dan (3) Penguatan persepsi kredensialisme pendidikan (Suryati, 1994).

Kondisi pengangguran tenaga kerja di Kabupaten Solok juga tercermin dari data pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja



Kabupaten Solok. Mayoritas pendididkan pencari kerja adalah SMA, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pencari kerja perempuan yang berpendidikan tinggi lebih besar dari laki-laki, yaitu perempuan yang berpendidikan Diploma sebanyak 23,8 persen sementara laki-laki hanya 16,7 persen. Begitu juga untuk tingkat pendidikan Perguruan Tinggi atau mereka yang sudah sarjana, dimana perempuan adalah sebesar 24,4 persen dan laki-laki 17,7 persen. Menurut Agus Suwignyo (Kompas, 22 September 2006: 6) bahwa tingginya jumlah penganggur lulusan sarjana mencerminkan tiadanya konsep pemerintah untuk mengelola dan mendayakan sumber daya manusia (SDM) terdidik. Ada *missing link* antara proses pembelajaran dan kebijakan pengelolaan universitas dengan proyeksi pemanfaatan hasil pendidikan tinggi bagi pembangunan masyarakat. Potensi SDM sering dirujuk, tetapi tanpa kebijakan memanfaatkannya secara tepat dan optimum. Terbatasnya pekerjaan dan gaji serta minimnya fasilitas pengembangan ilmu pasca kuliah kiranya bukti absennya konsep pengelolaan SDM terdidik. Tiadanya konsep pemerintah jelas kerugian mengingat mahalnya investasi masyarakat bagi pendidikan tinggi. Alih-alih menjadi pilar kemajuan, sarjana penganggur berpotensi menyulut disharmoni akibat pertimbangan praktis atas investasi.

**Tabel 4.7. Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2003 (Persen)**

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
T.S/SD Tdk Tmt	-	-	-
SD	1,5	0,7	1,0
SMP	5,2	3,6	4,2
SMA	58,9	47,5	51,5
D 1 dan D 2	8,6	11,7	10,6
Sarjana Muda / D 3	8,1	12,1	10,7
Sarjana	17,7	24,4	22,0
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>N</b>	<b>1.911</b>	<b>3.455</b>	<b>5.366</b>

Sumber : BPS Kabupaten Solok, Solok Dalam Angka 2003

Dalam upaya mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran, salah satu program kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok adalah menyelenggarakan program latihan kerja untuk para pencari kerja. Program tersebut bertujuan untuk membekali tenaga kerja yang akan masuk pasar

kerja dengan kemampuan dan ketrampilan kerja. Adapun jenis keterampilan atau kejuruan yang diajarkan adalah menjahit, ins. penerangan, elektronika, sepeda motor, bordir, peternakan, prosesing, meubeler dan magang perantau. Materi pelatihan sudah disesuaikan dengan permintaan pasar, yaitu perbengkelan dan otomotif. Dari lulusan peserta pelatihan ketrampilan tersebut, sebanyak 63 persen sudah bisa bekerja sendiri seperti membuka bengkel, menjahit dan memuat kue. Hal ini tidak terlepas dariantisipasi pihak Disnaker dalam melakukan rekrutment terhadap calon peserta pelatihan yang benar-benar berminat pada keterampilan teknis. Dalam materi yang diberikan mereka juga dibekali dengan kesadaran untuk bisa berdiri sendiri. Hal ini mengingatkan jiwa wirausaha dikalangan masyarakat masih rendah, minat generasi muda pada pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih tinggi. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda). Adanya isu putra daerah harus mendapat prioritas dan non putra daerah tidak diberi jabatan menyebabkan banyak instruktur potensial yang berasal dari Jawa mengajukan untuk pindah sehingga kekurangan tenaga instruktur.

Untuk itu perlu disadari bahwa sistim latihan kerja akan berfungsi menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja. Oleh karena itu program latihan kerja harus bersifat fleksibel karena waktu pelaksanaan relatif singkat dan kurikulum dapat segera disesuaikan dengan perubahan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Selain itu kurangnya keikutsertaan lembaga swasta dan dunia usaha cenderung mempertinggi jurang pemisah antara sistim pendidikan yang dapat mengembangkan jenis ketrampilan tertentu dengan dunia usaha yang memiliki informasi tentang jenis keahlian dan ketrampilan yang mereka butuhkan. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka ketidaksesuaian program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja akan tenaga ahli dan terampil akan melahirkan gejala pengangguran tenaga kerja terdidik yang terus berlanjut pula. Ketimpangan pasar kerja akan selalu timbul bila penyediaan tenaga kerja lebih banyak dari kesempatan kerja atau sebaliknya, hal ini dapat terjadi karena informasi pasar kerja tidak jalan atau syarat jabatan dan kualitas tenaga kerja tidak sesuai atau karena pilihan tenaga kerja itu sendiri.

Guna menjembatani ketidak sesuaian antara penyediaan tenaga kerja dengan pendidikan tampaknya pendidikan kejuruan (SMK) perlu lebih mendapat perhatian pemerintah. Sistim pendidikan dan pelatihan yang relevan akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap produktivitas sektoral dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disebabkan karena sistim pendidikan dan pelatihan merupakan sarana terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat relevansi program pendidikan dan pelatihan, semakin besar kemungkinannya bahwa

sistim tersebut akan dapat mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih serta produktif. Tenaga kerja produktif adalah mereka yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja baik dipandang dari jenis lapangan usaha maupun jenis jabatan.

#### **4.2.2. Setengah Pengangguran**

Konsep setengah penganggur didasarkan pada jumlah jam kerja per minggu. Berdasarkan kriteria BPS, jam kerja normal dalam seminggu seseorang bekerja adalah antara 35 -40 jam per minggu. Pekerja yang bekerja 35 jam atau kurang per minggu dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Berdasarkan data tahun 1990, 2000 dan 2004, pekerja yang termasuk kategori setengah penganggur kebanyakan berada pada sektor pertanian (sektor A). Hal ini disebabkan jenis pekerjaan di pertanian tidaklah sepanjang waktu, banyak waktu-waktu kosong pada saat menunggu panen. Demikian pula dalam hal pengolahan lahan hanya diperlukan paruh waktu. Pada tahun 1990 sebanyak 53,3 persen tenaga kerja di sektor pertanian memiliki jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Kemudian pada tahun 2000 setenga penganggur di sektor pertanian meningkat menjadi sekitar 70 persen dan sedikit turun pada tahun 2004. Diduga kondisi ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi tahun 1997 yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang beralih ke sektor pertanian.

Berdasarkan jenis kelamin, tenaga kerja setengah penganggur lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi pada semua sektor ekonomi. Namun ada kecenderungan perbedaan setengah menganggur pada laki-laki dan perempuan semakin kecil (lihat tabel 4.8). Perbedaan yang cukup tinggi terdapat pada sektor industri manufaktur pada tahun 2000. Proporsi setengah penganggur perempuan sebesar 64 persen semenara laki-laki 35 persen. Industri rumah tangga seperti industri makanan, kerajinan dan sebagainya banyak dimasuki oleh perempuan.

**Tabel 4.8 : Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Lapangan Kerja Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat !990 – 2004 (Persen)**

Lapangan Kerja	1990			2000			2004		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
A									
< 35	47,9	66,2	53,9	65,0	79,2	69,5	60,1	62,7	60,9
35-40	15,7	12,9	14,8	15,9	7,7	13,3	16,4	21,2	17,9
> 40	36,4	20,8	31,3	19,1	13,1	17,2	23,5	16,1	21,2
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M									
< 35	31,6	54,8	39,1	34,8	63,8	45,6	23,1	33,8	26,7
35-40	12,8	11,9	12,5	10,6	9,2	10,1	10,3	11,0	10,5
> 40	55,6	33,3	48,4	54,6	26,9	44,3	66,6	55,2	62,8
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100
S									
< 35	27,4	44,5	35,2	30,3	38,9	34,3	37,3	41,6	39,4
35-40	24,5	15,4	20,3	17,6	9,5	13,9	19,4	19,3	19,4
>40	48,2	40,1	44,5	52,1	51,6	51,9	43,2	39,1	41,2
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS ( Data diolah)

## BAB V

### PENUTUP

Perkembangan jumlah penduduk sebagai akibat adanya perubahan kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk mempengaruhi struktur penduduk dari usia muda ke usia dewasa atau usia produktif. Perubahan struktur penduduk tersebut berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan, dimana terjadi peningkatan usia kerja dan angkatan kerja. Seharusnya kondisi ini mampu mendorong pembangunan daerah dalam penciptaan lapangan kerja bagi pertumbuhan angkatan kerja. Namun gambaran kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak demikian, karena masih tingginya tingkat pengangguran di berbagai daerah sebagai dampak dari ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dibandingkan dengan ketersediaan kesempatan kerja. Gambaran ini merupakan isu pokok dan tantangan cukup berat bagi pembangunan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Apabila kondisi ini tidak diatasi, maka dikuatirkan bonus demografi sulit dicapai oleh Indonesia, bahkan akan semakin menjadi beban dalam pembangunan yang sedang dijalankan di berbagai daerah.

Mengacu kepada gambaran ketenagakerjaan tersebut diatas, maka Puslit Kependudukan-LIPI melakukan penelitian dengan mengangkat isu ketenagakerjaan yang akan dilakukan dalam kurun waktu empat tahun di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahap pertama (2006) yang merupakan tahap awal penelitian yang bertujuan untuk *'memetakan dan mengkaji pengembangan ketenagakerjaan di daerah berkaitan dengan adanya perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi'*. Dalam hal ini, kondisi ketenagakerjaan dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran yang sangat berkaitan dengan kondisi demografi dan sosial ekonomi masyarakat. Pemilihan Kabupaten Solok sebagai kasus lokasi penelitian adalah karena kondisi IPM daerah ini termasuk dalam kelompok rendah dengan tingkat kemiskinan penduduk cukup tinggi di antara daerah yang termasuk dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan penelitian tahap pertama ini dilakukan selama tahun 2006 dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber terkait di lokasi penelitian maupun BPS Jakarta dan kepustakaan.

## 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan di bawah ini:

- Seiring dengan program pembangunan di bidang kependudukan pada tahun 70-an sampai 90-an, yaitu adanya pembatasan jumlah kelahiran melalui Program Keluarga Berencana, telah berdampak pada penurunan jumlah penduduk Kabupaten Solok. Selama periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,10 persen turun menjadi 0,29 persen pada periode 1990-2000 lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat (0,59). Setelah tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Solok juga dipengaruhi oleh pemekaran wilayah Kabupaten Solok yang menyebabkan luas wilayah semakin kecil dan penurunan jumlah penduduk dengan pertumbuhan -0,48. Perubahan lainnya ada kecenderungan perubahan struktur penduduk dari penduduk usia muda ke penduduk usia produktif. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur, penduduk Kabupaten Solok tergolong sebagai penduduk sedang dengan proporsi penduduk usia 15 tahun ke bawah sebesar 30-40 persen. Perubahan struktur penduduk dari penduduk umur muda ke umur dewasa ditunjukkan dari peningkatan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas. Selama periode 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk pada kelompok umur di atas 15 tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif.
- Dinamika penduduk Kabupaten Solok juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Mobilitas atau merantau bagi penduduk Kabupaten Solok dan Sumatera Barat umumnya telah dilakukan sejak dahulu. Kota-kota besar di Indonesia bahkan keluar negeri merupakan tujuan mobilitas penduduk Kabupaten Solok. Mobilitas penduduk keluar banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif dan berpendidikan relatif tinggi. Mobilitas penduduk berpendidikan tinggi bertujuan untuk mencari pekerjaan setelah menamatkan pendidikan tinggi atau mereka yang melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Solok dan setelah tamat tidak kembali ke kampung. Mobilitas tenaga kerja berpeluang bagi peningkatan perekonomian Kabupaten Solok karena adanya remitten dari perantau untuk keluarga di Solok. Namun bagi dunia ketenagakerjaan hal ini kurang menguntungkan karena tenaga kerja produktif dan berpendidikan menjadi berkurang.
- Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Solok ditandai dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Selama periode 1990-2000 dan 2000-2004 laju pertumbuhan angkatan kerja meningkat masing-masing 0,1 persen dan 2,3 persen. Sementara proporsi angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan dari 98,5 persen (1990), menjadi 96,8 persen (2000) dan 91,5 persen (2004). Pengangguran adalah persoalan

pokok dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Solok. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Solok terus mengalami peningkatan selama 14 tahun terakhir. Pada tahun 1990 sebesar 1,5 persen meningkat menjadi 3,2 persen pada tahun 2000 dan meningkat lagi hingga mencapai 8,5 persen pada tahun 2004. Ini menunjukkan, bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok selama ini belum mampu menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang masuk pasar kerja. Berdasarkan jenis kelamin ada kecenderungan tingkat penganggur perempuan, baik yang berpendidikan rendah maupun tinggi lebih besar dari laki-laki. Ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan jumlah pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi juga kemungkinan untuk menganggur. Hal ini mencerminkan bahwa kesempatan kerja di sektor formal lebih banyak tersedia untuk laki-laki.

- Sektor pertanian menjadi andalan bagi perekonomian Kabupaten Solok. Selain memberi kontribusi terbesar pada perekonomian, sektor pertanian juga menyediakan kesempatan kerja bagi 60 persen lebih tenaga kerja di Kabupaten Solok. Namun ada kecenderungan penurunan kontribusi dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini mencerminkan minat pada sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan, dikalangan generasi muda tampak mulai menurun. Selanjutnya, peranan sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja masih rendah karena belum berkembangnya industri pengolahan di Kabupaten Solok. Keterkaitan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku dan sektor industri pengolahan (agroindustri) dalam pembangunan Kabupaten Solok masih kurang. Jiwa dagang bagi masyarakat Solok kelihatannya lebih menonjol dibandingkan jiwa wirausaha.
- Ada transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa. Ada kecenderungan mereka memilih bekerja sendiri dibanding bekerja sebagai pekerja keluarga. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya sifat masyarakat yang ingin bebas dan terbukanya kesempatan kerja untuk itu. Hal ini didukung oleh jiwa dagang yang cukup besar dan relatif mudahnya untuk masuk ke pekerjaan di sektor perdagangan maupun angkutan.

## **6.2. Rekomendasi**

Hasil dari kajian tersebut diatas, maka peneliti mencoba mengajukan beberapa alternatif rekomendasi bagi pengembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Solok, yaitu:

- Adanya kebijakan dalam ketenagakerjaan, terutama untuk memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian yang didasarkan pada potensi sumber daya alam. Dalam hal ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dilakukan melalui usaha keterkaitan antara sektor pertanian dan industri (agroindustri). Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan membuka peluang bagi investor untuk melakukan pengolahan hasil pertanian. Untuk itu perlu diberi berbagai kemudahan seperti perizinan, pemanfaatan hak ulayat tanah dan berbagai insentif lainnya.
- Pengembangan sektor pengolahan/ industri di Kabupaten Solok masih sangat lemah. Usaha pengolahan yang paling tepat adalah agroindustri, mengingat potensi hasil pertanian dan perkebunan dari daerah ini cukup besar. Usaha tersebut adalah pengolahan kopi, cokelat, buah markisa, kelapa dsb. Buah markisa selama ini hanya dikonsumsi langsung belum diolah menjadi minuman yang lebih tahan lama (pernah diolah tapi gagal) dan dijual ke luar daerah. Pengolahan kopi dan cokelat masih diolah secara sederhana, sehingga mutunya belum optimal. Apabila usaha tersebut dikembangkan di daerah ini akan meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan usaha yang lebih banyak. Teknologi yang diterapkan mestinya teknologi yang lebih modern, kualitas produk yang bermutu dan kemasan yang lebih baik. Untuk itu perlu diberikan materi pelatihan yang lebih terarah oleh Departemen Perindustrian dan instansi terkait, seperti 1) perbaikan mutu hasil industri 2) pengolahan hasil pertanian, pemasaran dan 3) kemasan hasil industri.
- Sebagai sektor andalan maka pembangunan sektor pertanian perlu ditingkatkan mengingat ada kecenderungan menurunnya kontribusi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Untuk menarik minat tenaga kerja kembali menekuni sektor pertanian, maka perlu diterapkan teknologi pertanian yang sesuai dengan minat tenaga kerja muda. Dengan teknologi pertanian yang lebih modern akan meningkatkan minat generasi muda ke sektor pertanian. Untuk menyambut teknologi yang akan diterapkan perlu diperbanyak sekolah-sekolah lanjutan kejuruan atau politeknik yang menunjang modernisasi usaha pertanian dan perkebunan. Di samping itu juga perlu dilakukan sosialisasi pentingnya meningkatkan sektor pertanian dan komoditi pertanian pada masyarakat dan generasi muda melalui media atau cara-cara yang menarik.
- Untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja di Kabupaten Solok, sektor pertambangan juga perlu mendapatkan prioritas. Mengingat wilayah ini juga memiliki potensi pertambangan, seperti batu bara, bijih besi, emas dan lain-lain. Apabila prosedur dan iklim investasi diciptakan



lebih kondusif akan menarik investor masuk sehingga banyak kesempatan kerja dapat diciptakan yang akan memanfaatkan tenaga penganggur.

- Untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut antara lain dengan cara merealisasikan pembangunan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, saluran irigasi dan bendungan) agar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dengan masuknya investor tersebut diharapkan akan dapat menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya. Selain itu, perlunya mengembangkan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri bioteknologi, pariwisata serta pertambangan dan energi. Dengan pengelolaan secara professional maka dalam waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris (1997)  
Peran Analisis Demografi dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, dalam *Widjojo Nitisastrri 70 tahun, Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan*, Moh. Arsjad Anwar (Ed), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- (Ed), (1998)  
*Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Demografi- UI.
- Asnan, Gusti (2003)  
*Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Percetakan Gunatama.
- Amir M.S  
*Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- BPS Kabupaten Solok (1990)  
*Kabupaten Solok Dalam Angka 1990*.
- BPS Kabupaten Solok (2000)  
*Kabupaten Solok Dalam Angka 2000*.
- BPS Kabupaten Solok (2005)  
*Kabupaten Solok Dalam Angka 2004*. Padang: Percetakan Demy.
- BPS (2004)  
*Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 1997- 2003*, BPS.
- BPS (1997)  
*Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi: Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995*; Seri S3, Biro Pusat Statistik, Jakarta , 1997.

- BPS Kabupaten Solok (2004)  
*Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok dan Kecamatan Tahun 2004*, Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Solok dengan BPS Kab. Solok.
- Bappenas (2003)  
*Fleksibilitas Kebijakan Pasar Kerja untuk Memperluas Kesempatan Kerja*, Working Papers Series No. 2 Pusat Kajian Asia Timur, Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya . Jakarta.
- Becker, Gary S. (1976)  
*The Economic Approach to Human Behavior*, The University of Chicago Press Chicago and London.
- Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (Penyunting) (1983)  
*Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Di Kota*, Diterbitkan Untuk Yayasan Obor Indonesia Dan Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan UGM, PT Gramedia, Jakarta.
- Dinas Kependudukan, KB, dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok (2001)  
*Profil dan Proyeksi Ketenagakerjaan Di Kabupaten Solok 2001 – 2005*.
- Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Solok (2006)  
*Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Solok 2006-2010*, Pemerintah Kabupaten Solok, Dinas Pertanian.
- Dernberg dan Mc Dougall (1972)  
*Macro Economics, 4<sup>th</sup> edition*, McGraw-Hill, 1972.
- Ehrenberg, Ronald G. dan Robert S Smith, 1997, *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*, Six Edition, Addison-Wesley.
- Hidayat (1982)  
*Strategi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia*, Dalam Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi, Prijono Tjiptoherijanto dkk (Ed), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

- Jones Gavin W dan Bondan Supraptilah (1983)  
*Underutilization Tenaga Kerja di Palembang dan Ujung Pandang, Dalam Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Di Kota, Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (Penyunting), Jakarta : PT Gramedia.*
- dkk (1999)  
*Pendidikan Dan Pasar Kerja Di NTT: Studi Penelusuran Terhadap Siswa SLTA Tahun 1996 Di Pulau Timor, Kerjasama Pusat Penelitian Penduduk Dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI\_ dengan Australian National University (ANU-Canberra) dan The Australian Agency For International Development (AusAID), Jakarta.*
- BPS Kabupaten Solok (1990)  
*Kabupaten Solok Dalam Angka tahun 1990, Kab. Solok*
- Kepala BKKBN (2006)  
*Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Makalah Disampaikan pada Seminar Koalisi Kependudukan, Jakarta, 11 Mei 2006.*
- Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja (1997)  
*Studi Kebijaksanaan Tenaga Kerja Untuk Penyusunan Program Aksi Penanggulangan Pengangguran di Sumatera Barat, Kerjasama Kanwil Depnaker dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas.*
- Karimi, Syafruddin (2001)  
*Pembangunan Kelembagaan Ekonomi Nagari, Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel 'Membanguna Kembali Pemerintahan dan Masyarakat Nagari, Padang, 30 April 2001.*
- Moertiningsih, S, (2005)  
*Bonus Demografi, Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi, disampaikan pada Pidato Disertasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi UI, Jakarta 30 April 2005.*
- Prijono Tjiptoheriyanto (2001)  
*Kependudukan dalam Era Reformasi, P2K UGM.*

- Payaman Simanjuntak, 2003  
*Manajemen Hubungan Industrial*, Pustaka Sinar Harapan,  
Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Solok (2005)  
*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun  
2006-2010*, Pemerintah Kabupaten Solok.
- Suryadi, Ace (1994)  
*Sebuah Mitos Tentang Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik*,  
disampaikan dalam diskusi dalam rangka peluncuran buku  
'Dinamika Pembangunan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Daerah  
Perkotaan Indonesia' LIPI, Departemen Pendidikan Dan  
Kebudayaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Jakarta.
- Sutomo Hedi (1983)  
*Pengangguran di Kota: Suatu Analisa Terhadap Pemuda dan  
Golongan Terdidik*", dalam Partisipasi Angkatan Kerja, Kesempatan  
Kerja dan Pengangguran Di Indonesia", penyunting Zaenab Bakir  
dan Chris Manning. Yogya: Pusat Penelitian dan Studi  
Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Tirtosudarmo, Riwanto (1985)  
*Struktur Demografis Penduduk Usia Muda dan Masalah  
Pengangguran di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Asian  
Social Sciences Research Council Pre-Seminar, Jakarta, 17-18 Mei  
1985.
- Tukiran (2005)  
*Perubahan Kesempatan Kerja Perempuan Di Jawa – Bali 1980-  
2003*, Makalah Dalam Populasi, Buletin Kependudukan Dan  
Kebijakan, Vol. 16, No. 2 Tahun 2005) Pusat Studi Kependudukan  
Dan Kebijakan, Yogyakarta.
- Tri Pranadji (2004)  
*Penduduk dan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Era  
Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No. 4 Desember  
2004.
- UNDP (2005)  
*Human Development Report 2004*.

Widianto, Bambang, 2005

*Employment Creation Policy* , Conference 'Policy Options for an Employment Action Plan', Jakarta, 26-27 April, BAPPENAS and UNSFIR.

Widarti, Diah, 1984

*Analisa Ketenagakerjaan di Indonesia: Berdasarkan Data Sensus Penduduk Tahun 1971 dan 1980*, Dalam *Analisa Ketenagakerjaan di Indonesia: Berdasarkan Data Sensus Penduduk 1971 dan 1980*. Chris Manning dan Mikhael Papayungan (eds). Jakarta: BPS dan PPSK-UGM.





## LAMPIRAN

**Lampiran 1: Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat.**

Kabupaten	Tahun			Laju Pertumbuhan (%)	
	1990	2000	2004	1990-2000	2000-2004
Kabupaten:					
Kep. Mentawai	-	60.897	67.375		2,56
Pesisir Selatan	371.934	391.347	417.706	3,82	1,64
Solok	427.476	438.975	457.389	3,68	1,03
Swl/Sijunjung	297.129	307.810	343.819	3,66	2,80
Tanah Datar	342.139	327.114	339.216	2,37	0,91
Padang	501.718	432.790	375.538	1,83	-3,5
Pariaman					
Agam	407.767	414.972	428.433	3,08	0,80
Lima puluh	297.009	311.773	324.258	3,08	0,99
Kota					
Pasaman	451.151	513.674	555.486	4,89	1,98
Kota:					
Padang	631.543	713.242	784.740	4,00	2,42
Solok	42.715	48.120	55.709	4,15	3,73
Sawahlunto	15.279	50.868	53.837	15,58	1,44
Padang	38.577	40.139	44.699	2,99	2,73
Panjang					
Bukittinggi	83.811	91.983	100.254	3,53	2,17
Payakumbuh	90.872	97.907	104.377	3,35	1,61
Pariaman		-	75.406		
Total	3.999.120	4.241.605	4.528.242	3,68	1,83

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 1990-2004.

## Lampiran 2: Proporsi Penduduk Kabupaten Solok

Kelompok Umur	Tahun		
	1990	2000	2004
0-4	12.47	11.22	9,82
5-9	14.69	13.01	10,62
10-14	13.77	11.66	11,56
15-19	10.1	9.85	10,95
20-24	7.45	7.29	8,10
25-29	7.64	6.33	7,08
30-34	6.63	7.21	6,65
35-39	6.27	7.73	6,46
40-44	3.64	6.21	6,65
45-49	3.8	4.66	6,18
50-54	3.73	3.61	4,64
55-59	2.57	2.68	2,71
60-64	2.91	2.75	3,07
65+	4.31	5.76	5,48
Total	100	100	100

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, BPS

## Lampiran 3: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Solok Tahun 2004

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Penduduk		Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
		Jumlah	Persen	
1. Pantai Cermin	366,00	20.243	5,92	55
2. Lembah Gumanti	459,72	47.433	13,88	103
3. Hiliran Gumanti	263,28	16.049	4,70	61
4. Payung Sekaki	364,50	8.322	2,44	23
5. Tigo Lurah	602,5	8.678	2,54	14
6. Lembang Jaya	99,90	25.135	7,36	252
7. Danau Kembar	70,10	19.129	5,60	273
8. Gunung Talang	385,00	43.793	12,82	114
9. Bukit Sundi	109,00	22.389	6,55	205
10. IX Kt Sei Lasi	171,00	10.140	2,97	59
11. Kubung	192,00	53.302	15,60	278
12. X Koto Di Atas	257,00	21.118	6,18	82
13. X Kt Singkarak	295,50	32.689	9,57	111
14. Junjung Sirih	102,50	13.277	3,89	130
Kabupaten Solok	3.738,00	341.697	100	91

Sumber: Kab. Solok Dalam Angka 2003 & Suseda 2004, BPS.

**Lampiran 4: Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja Di Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota	Jumlah			Pertumbuhan	
	1990	2000	2004*	1990-2000	2000-2004
Kep Mentawai			49.570		
01. Pesisir Selatan	268.879	293.941	325.029	0,89	2,55
02. S o l o k	305.758	332.179	358.491	0,83	1,92
03. Sawahlunto/Sijunjung	214.750	232.363	264.109	0,79	3,25
04. Tanah Datar	258.859	259.213	275.480	0,01	1,53
05. Padang Pariaman	360.867	376.398	292.898	0,42	-6,08
06. A g a m	306.360	324.929	336.151	0,59	0,85
07. Limapuluh Kota	230.133	249.323	253.289	0,80	0,39
08. P a s a m a n	318.543	378.448	423.132	0,02	2,83
71. P a d a n g	482.007	569.369	636.460	1,68	2,82
72. S o l o k	32.036	36.882	43.384	1,42	4,14
73. Sawahlunto	11.956	38.170	42.878	12,3	2,95
74. Padang Panjang	29.871	31.361	34.536	0,49	2,44
75. Bukittinggi	64.994	71.425	78.743	0,95	2,47
76. Payakumbuh	70.400	78.060	82.209	1,04	1,30
Pariaman			59757		
Total	2.955.413	3.272.061	3.556.116	1,02	2,10

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS. (Data Diolah)

\*) Data penduduk Kabupaten Solok sebelum pemekaran.

**Lampiran 5: Jumlah dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Di Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota	Jumlah			Pertumbuhan	
	1990	2000	2004*	1990-2000	2000-2004
Kep. Mentawai			23.097		
01. Pesisir Selatan	124.705	122.971	148.420	-0,14	4,81
02. S o l o k	175.535	177.692	194.676	0,12	2,31
03. Sawahlunto/Sijunjung	128.344	129.629	141.181	0,10	2,16
04. Tanah Datar	132.134	139.981	128.369	0,58	-2,14
05. Padang Pariaman	164.509	169.932	137.335	0,32	-5,19
06. A g a m	161.015	174.143	173.793	0,79	-0,05
07. Limapuluh Kota	134.217	148.735	135.729	1,03	-2,26
08. P a s a m a n	209.651	211.563	244.723	0,09	3,71
71. P a d a n g	187.377	252.902	271.480	3,04	1,78
72. S o l o k	13.529	16.294	21.199	1,88	6,80
73. Sawahlunto	5.294	19.604	21.568	13,99	7,26
74. Padang Panjang	10.961	15.177	17.995	3,30	4,35
75. Bukittinggi	29.558	36.466	44.198	2,12	4,92
76. Payakumbuh	30.754	40.997	46.293	2,92	3,08
			29.908		
Total	1.507.583	1.656.086	1.779.964	0,94	1,82

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, BPS (Data Diolah)

\*) Data penduduk Kabupaten Solok sebelum pemekaran.

Lampiran 6: Proporsi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Solok

Tingkat Pendidikan	1990			2000			2004		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tdk/blm sekolah	47.21	56.80	51.04	36.72	42.81	39.04	26.99	33.44	29.33
SD	29.87	24.93	27.90	28.36	25.94	27.44	32.39	24.27	29.44
SMP	11.16	8.08	9.94	17.56	13.14	15.88	17.91	14.8	16.78
SMA	9.80	8.71	9.37	14.35	12.05	13.48	18.44	19.26	18.74
Dipoma/PT	1.95	1.48	1.76	3.00	6.07	4.17	4.28	8.23	5.71
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Data Diolah dari Data Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004

Lampiran 7: Proporsi Angkatan Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Solok

Kel. Umur	1990			2000			2004		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
10-14	4.34	3.53	4.02	2.77	0.71	1.99	0.83	1.17	1,10
15-19	10.77	9.37	10.21	9.97	6.65	8.71	7.51	6,30	8,17
20-24	11.40	11.75	11.54	11.86	7.98	10.38	10.56	13,57	13,79
25-29	14.01	14.17	14.07	10.43	13.48	11.59	11.59	10,90	12,26
30-34	12.35	12.22	12.30	9.88	11.77	10.60	12.54	13,03	11,00
35-39	12.87	11.16	12.19	14.55	17.43	15.64	12.76	12,76	11,98
40-44	7.18	7.89	7.46	11.77	11.44	11.64	9.38	11,96	12,33
45-49	6.76	8.58	7.49	10.17	11.35	10.62	9.71	9,57	8,17
50-54	6.96	7.67	7.24	6.33	5.03	5.84	8.92	8,50	9,06
55-59	4.29	5.23	4.67	3.52	6.36	4.60	5.39	3,20	3,51
60-64	4.45	4.95	4.65	4.26	4.60	4.39	4.35	5,13	4,15
65+	4.62	3.48	4.16	4.48	3.18	3.99	6.46	3,90	4,47
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100

Sumber: Data Diolah dari Data Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004

**Lampiran 8: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Solok Atas Dasar  
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

LAPANGAN USAHA	1990	2000	2004
<b>PERTANIAN</b>	54,04	41,85	41,93
Tanaman Pangan	43,21	33,92	32,98
Perkebunan	5,80	4,33	5,26
Peternakan	2,18	2,14	2,37
Kehutanan	0,82	0,80	0,67
Perikanan	2,03	0,67	0,65
<b>PERTAMBANGAN &amp; PENGGAJIAN</b>	0,80	3,39	3,69
Migas		0,00	0,00
Nonmigas		0,00	0,00
Penggalian		3,39	3,69
<b>INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	5,19	7,20	7,30
Industri Migas		0,00	0,00
Industri Tanpa Migas		7,20	7,30
<b>LISTRIK, GAS &amp; AIR BERSIH</b>	0,55	0,36	0,52
<b>BANGUNAN</b>	3,27	5,13	5,49
<b>PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	18,42	14,08	14,45
Perdagangan Besar	18,12	13,32	13,69
Hotel	0,01	0,00	0,00
Restoran	0,28	0,76	0,75
<b>PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	4,91	9,63	10,22
Angkutan	4,79	9,34	9,88
Komunikasi	0,11	0,29	0,34
<b>KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN</b>	3,83	2,12	2,07
<b>JASA-JASA</b>	9,01	16,23	14,33
Pemerintah		13,18	11,17
Swasta		3,05	3,16
<b>PDRB</b>	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Solok Tahun 1989-2004.



**Lampiran 9: Jumlah Lulusan Pelatihan Ketrampilan Yang Bekerja  
Dirinci Menurut Kejuruan Sampai Dengan Triwulan IV  
2004.**

<b>Kejuruan</b>	<b>Jumlah Lulusan</b>	<b>Jumlah Bekerja</b>	<b>% Bekerja</b>
1. Menjahit	66	42	63,6
2. Ins. Penerangan	10	3	30,0
3. Elektronika	6	1	16,7
4. Sepeda Motor	18	11	61,1
5. Bordir	20	7	35,0
6. Peternakan	10	1	10,0
7. Prosesing	52	33	63,5
8. Meubeler	10	2	20,0
9. Magang Perantau	10	6	60,0
<b>Jumlah</b>	<b>202</b>	<b>106</b>	<b>52,5</b>

Sumber : Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, 2004.

